

NOTULENSI

**PERKEMBANGAN DAN PETA JALAN NDC DI SEKTOR LAHAN
DAN PELUANG PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET INDONESIA**



Narasumber

Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D,

Direktur Lingkungan Hidup,
Bappenas

Prof. Dr. Rizaldi Boer

Direktur Eksekutif CCROMSEAP-
IPB

Eka Melisa

Climate and Development
Policy Expert

Fasilitator

Iwan Wibisono

Climate and Forest Policy Expert

Selasa, 10 Maret 2020

09.00 – 16.00 WIB

Notulensi Workshop MADANI

Perkembangan dan Peta Jalan NDC di Sektor Lahan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Pencapaian Target Indonesia

Hari, tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Tempat : Aston Priority Simatupang & Conference Center

Waktu : 09.15 – 16.29 WIB

Peserta :

Teguh Surya-Madani	Agus Salim-Hatfield	Ardiyanto-Econusa
Nadia H-Madani	Iwan Wibisono-Konsultan	Al Ayubi-PWYP Indonesia
Ruth Stephanie-Madani	Medrilzam-Bappenas	Fathur Rozidin-Pusaka
Yosi Amelia-Madani	Ahfi Wahyu-Kehati	Priska-Antara
Arinta Hapsari-Hatfield	Cynthia-WRI	Rohmandha-KT
Rizaldi Boer-CCROMSEAP IPB	Adila-Greenpeace	Indra-Mongabay
Luluk Uliyah-Madani	Hasbi B-Kemitraan	Utami-TII
Sigid Ariyanto-Hatfield	Haykal-Kemitraan	Bona RG-USAID
Jasmine-Greenpeace	Pamela-IESR	NovriAuliansyah-TuK Indonesia
Anjelita Malik-YKAN TNC	Ricky-Traction	Nurjanah-Pattiro
Ribka-Kemitraan	Yuyun Indradi-Trend Asia	A Azis K-Coaction
Ogy Dwi Aulia-FWI	Chaakimah-Epistema Institute	Eka Melisa

SESI I

Luluk Uliyah

Assalamualaikum, selamat datang di acara *Perkembangan dan Peta Jalan NDC di Sektor Lahan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Pencapaian Target Indonesia*. Selamat datang Pak Rizaldi Boer Direktur Eksekutif CCROM IPB. Selamat datang Pak Medrilzam Direktur Lingkungan Hidup Bappenas. Terima kasih kawan-kawan dari berbagai masyarakat organisasi sipil yang sudah hadir pada pagi ini. Saya persilahkan ke Nadia Hadad Direktur Enggagement Yayasan Madani Berkelanjutan untuk menyampaikan kata pengantar dan sambutan.

Nadia Hadad

Selamat pagi Bapak Medrilzam, Bapak Rizaldi Boer, dan juga kepada teman-teman CSO dan teman-teman media. Assalamualaikum. Selamat datang di acara *Perkembangan dan Peta Jalan NDC di Sektor Lahan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Pencapaian Target Indonesia*.

Dalam beberapa hari belakangan ini kita dihebohkan dengan isu COVID 19. Namun sebenarnya ada ancaman yang sudah bertahun-tahun ada yaitu ancaman perubahan iklim yang mengancam seluruh penduduk dunia, yang kalau tidak action akan menimbulkan dampak yang cukup menakutkan. Kalau kita tidak memenuhi target yang harus kita penuhi, implikasinya akan sangat serius. Karena itu MADANI, berperan untuk menjembatani berbagai stakeholders: pemerintah, akademisi, NGO, maupun pemda, kita ingin supaya ada sinergitas yang terjadi. Kami sangat mengapresiasi bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, seperti NDC Roadmap, Green RPJMN, Perpres NDC, Perpres PPRK, kemudian melalui KLHK tahun ini harusnya menyampaikan update. Kami di NGO pun juga aktif mendorong dan mendukung semua usaha yang dilakukan pemerintah. Tapi banyak yang masih menjadi pertanyaan, apakah target 29-40% emisi memang sudah cukup ambisius? Hari ini kita akan membicarakan dari sektor lahan. Bagaimana kita bisa mencapai target yang sudah kita canangkan tersebut. Untuk diskusi hari ini akan dipandu oleh Bapak Iwan Wibisono.

Iwan Wibisono

Selamat pagi, terima kasih pada Pak Medril dan Pak Rizaldi. Kita memiliki narasumber yang sangat mumpuni. Karena mastermind NDC Indonesia ini mereka berdua. Flashback beberapa minggu yang lalu, banyak refleksi bagaimana masyarakat sipil terlibat di dalam proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termasuk juga bagaimana kita membaca dokumen yang disubmit pemerintah. Kalau boleh Pak Rizaldi mengajari kita bagaimana membaca NDC.

Hari ini kita akan mencoba memahami lebih baik: target indonesia itu, bagaimana pencapaiannya, apa saja pilihan mitigasinya. Nanti kita lanjutkan apa sih yang akan kita lakukan sebagai masyarakat sipil dalam konteks perubahan iklim. Kita memiliki empat pembicara, yaitu Pak Medrilzam mengenai *low carbon initiative* kedalam kegiatan pembangunan di Indonesia oleh seluruh sektor, bu Ema mengenai perspektif KLHK dalam mitigasi pada sektor berbasis lahan, Eka terkait isu-isu perubahan iklim, dan Pak Rizaldi mengenai NDC di Indonesia dan strategi pencapaiannya. Untuk mempersingkat waktu silahkan Pak Rizaldi.

MEMBACA NDC INDONESIA SEKTOR HUTAN DAN LAHAN (Rizaldi Boer, CCROMSEAP IPB)

Rizaldi Boer

Baik makasih banyak. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi terus, karena peran dari masyarakat sipil itu penting untuk mendukung implementasi NDC Indonesia. Sektor kehutanan diberikan beban paling besar untuk pencapaian NDC, yaitu 17% dari 29% target penurunan emisi. Kira-kira proyeksi emisi dari sektor lahan yang terbesar memang dari kebakaran. Posisi yang kedua deforestasi, dekomposisi, PHPL dan rehabilitasi. Kalau kita berhasil di 3 yang pertama itu sebenarnya sudah sangat besar sekali yang bisa dicapai target dari sektor ini.

Kita sederhanakan, bagaimana sih deforestasi, dalam konteks BAU, 14,4 juta hektar dari 2013-2030 sementara untuk target emisi CM31, di lahan gambut. Kalau kita gambarkan grafiknya gini. Kondisi BAU 2030 deforestasi mencapai 15,5 juta hektar, kalau target CM 1 tidak boleh lebih dari 7,26 juta hektar, tapi selama 2013-2017 saja sudah deforestasi 3,30 juta hektar. Kalau kita lihat kebijakan moratorium, ilegal dan sebagainya, di dalam konsesi itu sendiri pada 2017 HTI yang masih berhutan alam 2,92 juta hektar. Sementara PIAPS 6,14 juta hektar yang masih berhutan alam, jadi total 10,5 juta hektar yang masih berhutan alam. Kalau seandainya perusahaan mengkonversi semua, target CM2 (4,15 juta hektar) tidak akan tercapai.

Ini opsi-opsinya. Kita melihat peran dari swasta dulu ya. Semua areal yang masih berhutan alam, yang masih memiliki ekosistem yang tinggi itu dikonservasi. Itu Opsi 1. Kalau wilayah itu tidak lagi memiliki ekosistem tinggi, pilihannya adalah bisa dikonversi. Opsi 2, areal yang memiliki IJL rendah 20% tambahan untuk dikonservasi. Opsi 3-5 masing-masing persentase dikonservasinya dinaikan, yaitu 40%, 60%, dan 90%. Mari kita perjelas:

Pada opsi pertama, terdapat hutan alam 10,5 juta hektar, konservasi dan semua yang memiliki IJL itu kita konservasi, berarti ada sekitar 5,8 juta hektar yang akan dikonservasi. Artinya akan dikonversi 4,6 juta hektar. Sementara NDC batasnya 3,96 juta hektar. Kalau seandainya pemegang konsesi hanya mengkonservasi areal arahan lindung (wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi, high carbon stock, memiliki layanan jasa lingkungan lainnya), maka kita sudah negatif. Artinya target NDC tidak tercapai. Kalau mereka mau pakai opsi kedua, 20% lagi yang dikonservasi (melalui HCS, HCV, dan lain-lain), maka akan meningkat menjadi 3,7 juta. Berarti masih ada sisa 240 ribu hektar yang di luar konsesi yang mungkin boleh terdeforestasi. Yang aman itu kita sampai pada skenario 4.

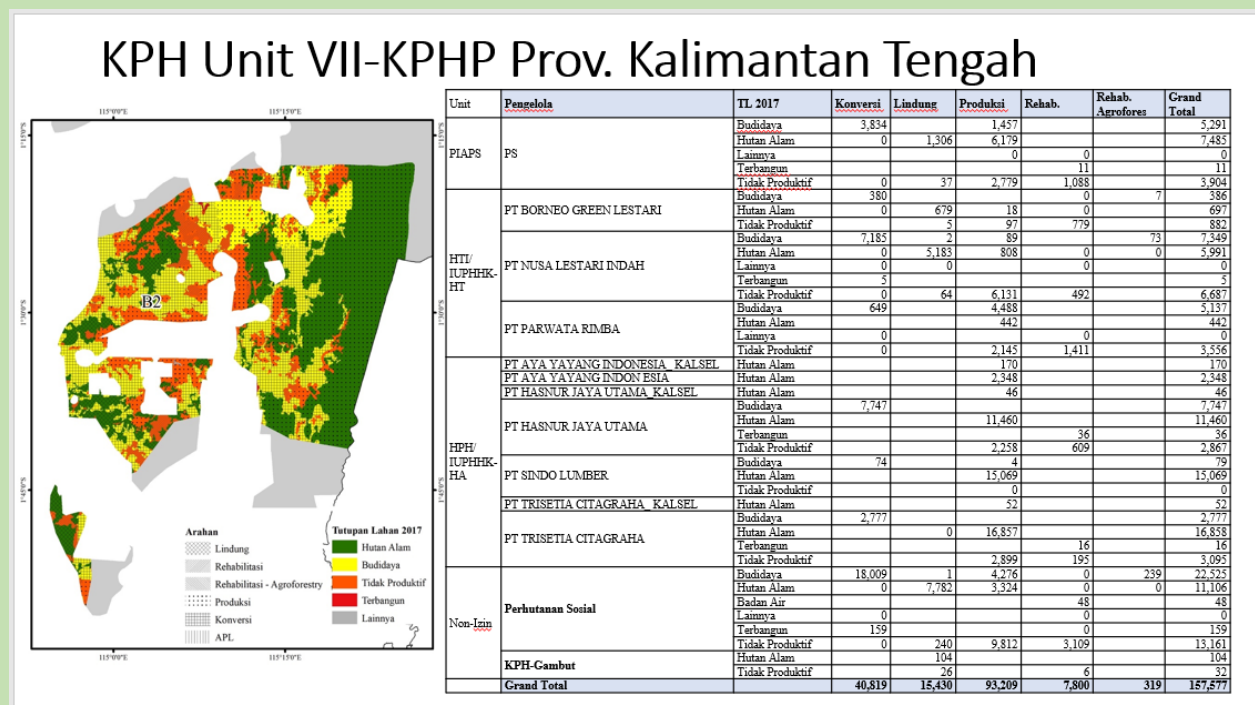
Ini sedikit gambaran saya mengenai pentingnya menjaga arahan lindung yang tadi saya sampaikan. Arahan lindung itu menjadi pusat sumber air, semua yang kita kaji ini adalah wilayah yang harus dikonservasi karena memberikan jasa ekosistem.

Kalau kita lihat data yang ada, kalau perusahaan masuk skenario 4 agak berat. Terutama di Papua. Papua yang masih berhutan alam, dikasih HTI pasti land clearing yang berarti deforestasi. Kalau kita pakai skenario yang optimum, 61% saja yang dikonservasi. Sementara dari HGU butuh 62,1% dengan pertimbangan yang sama. Sedangkan PIAPS, jika dia masih berhutan alam, ini masih negatif, dan ini lebih baik tidak dikasih untuk HTR. Di sana kita bisa

lihat PIAPS 89,4% bisa kita konservasi, maka ada jatah 1,6 juta lagi yang mesti dikonservasi untuk mencapai target NDC. Ini hanya sebagai gambaran ya.

Bagaimana strategi implementasinya? Dalam permenLHK terdapat istilah Indeks biogeofisik: yaitu untuk melihat wilayah mana saja dengan resiko tinggi deforestasi yang dilihat dari data laju deforestasi historis masa lalu dan kondisi tutupan lahan yang masih tersisa saat ini. Jadi kalau deforestasi masa lalunya tinggi, berarti faktor pendorong deforestasi sudah banyak di situ. Nah wilayah demikian merupakan wilayah prioritas tinggi, ini yang menjadi arahan untuk melaksanakan kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga tidak lepas dari kelembagaan pada tingkat tapak. Oleh karena itu ada analisis KPH-nya. KPH dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: 1 dan 2) kelola masyarakat ketika modal sosial tinggi dan kapasitas kelembagaan (KPH) lemah; 3) kelola pemerintah ketika modal sosial rendah dan kelembagaannya tinggi; 4) kelola swasta ketika modal sosialnya rendah, kelembagaan pemerintahnya rendah.

Bagian ini yang bisa kita lihat langsung di peta, berbasis spasial: siapa unit pengelola, kawasan resiko tinggi deforestasinya, tipologi KPH yang bekerja di sana (tipe a belum ada izin, tipe b sudah dibebani izin, tipe c kurang dari 50% belum dimanfaatkan tipe d lebih dari 50% areanya sudah dibebani izin). Sebagai gambaran kita bisa lihat per unit KPH: ini adalah perusahaan yang beroperasi siapa aja, kondisi tutupan lahan seperti apa, kemudian di sana ditunjukkan lokasi arahan lindung sesuai dengan ekosistemnya, dan ini juga akan menentukan arahan pemanfaatan dan pengelolaan yang harus dikembangkan dengan masyarakat, pemerintah, atau KPH maupun perusahaan. Inilah asesmen yang sedang dilakukan oleh KLHK melalui strategi berbasis spasial di tingkat masyarakat.



Bercerita tentang pencegahan deforestasi tentu sangat tergantung keberhasilan dari sektor yang lain terutama pertanian yang membutuhkan lahan kedepan. Oleh karena itu, dalam NDC

juga dilihat kebutuhan lahan kedepan untuk mencapai target sektor pertanian (swasembada pangan, meningkatkan pendapatan dari perkebunan, dan lain-lain): berapa target produktivitas untuk mencapai kebutuhan pertanian. Hitungan berupa hasil komunitas (yield), jadi yang 8,8 yang bisa dicapai, yang biru eksisting 2010 yang warna oranye yang harus ditingkatkan agar permintaan lahannya bisa berkurang. Kemudian intensitas penanaman juga berpengaruh, termasuk di Jawa, yang sulit itu di luar Jawa. Kemudian untuk *upland rice* malah kurang dari 1, padi gogo ada yang tidak tanam. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu ketersediaan air, teknologi, apalagi kalau daya dukungnya berkurang, semakin menjadi PR. Ini menjadi yang sangat penting bagaimana wilayah arahan lindung ini harus direhabilitasi secepatnya.

Ini beberapa pemikiran inovasi regulasi yang harus dilakukan. Pertama kawasan lindung harus wajib dikonservasi, kemudian pelarangan penebangan pada areal kerja HTI yang masih berhutan alam primer dan gambut, perusahaan harus melakukan konservasi. Tapi kalau memang di konsesi masih berhutan alam, kita bisa berikan izin untuk mereka untuk HHBK, atau TPTI tidak menggunakan land clearing. Apalagi sekarang sedang disusun perizinan dengan pendekatannya multi izin, dulu kan hanya HTI saja, sekarang satu perusahaan bisa nanam selain HTI. Jadi berbagai aktivitas bisa dilakukan oleh satu perusahaan. Dengan multi izin dan juga dengan PermenLHK 62/2019 komoditas perkebunan sudah bisa masuk di dalam kawasan, komoditas hutannya juga tidak dibatasi, dan tapi tidak monokultur harus berorientasi hutan. Untuk mendukung perusahaan melakukan konservasi meski dia tidak masuk arahan lindung, seharusnya ini bisa dapat RBP (*result based payment*). Sekarang ini banyak sekali perusahaan yang sudah melakukan itu (konservasi) tetapi tidak ada mekanisme pelaporannya.

Kemudian pada bagian degradasi hutan, berupa perubahan tutupan hutan dari semula hutan primer menjadi hutan sekunder biasanya di HPH. HPH yang masih memiliki hutan primer, kalau di logging akan mengalami degradasi, ini BAU nya cukup besar, bagaimana kita memanfaatkan untuk mereka bisa berkontribusi. Yang masih berhutan primer 6,2 juta hektar. Kalau ditebang bisa melebihi, tapi kalau IJL nya hanya 1,2 juta hektar, berarti ada potensial. Tapi memang dari pihak swastanya (APHI) juga mengatakan penebangan juga tidak mungkin dilakukan (tidak untuk secara ekonomi) karena terlalu jauh. Yang seperti ini seharusnya bisa ada insentifnya, atau misalnya melalui carbon pricing. Ini gambaran kondisi wilayah HPH sesuai dengan resiko emisi, tinggi berarti dekat dengan pemukiman, yang berhutan gak sampai sejuta, hanya sampai 70.000 hektar agak berat untuk dijaga. Hal ini akan menjadi gambaran strategi pengelolaan dan pembinaan dengan masyarakat di sekitar hutan. Banyak wilayah status PHPL nya baik, tapi berada di wilayah high risk. Ini menjadi salah satu indikator PHPL nya dilakukan dengan baik atau tidak, karena rata-rata PHPL itu dibuat hanya untuk kelengkapan dokumen saja. Pada wilayah yang memiliki IJL tinggi dan hutan alam, jangan lagi kayunya lagi yang dimanfaatkan tapi jasa ekosistemnya, tapi ini harus diperhitungkan insentifnya.

Strategi implementasi NDC lain adalah melalui hutan lestari, yang lebih banyak kepada penerapan teknologi (*reduce impact logging*) dan pengayaan (*enrichment planting*). Luas yang harus menerapkan SFM. Mana yang enrichment planing, lalu kita petakan. Ini gambaran untuk wilayah HPH, dari kedua jenis tersebut (penerapan teknologi atau pengayaan) tergantung dari kondisi tutupan hutannya. Di atas 70% itu menerapkan *reduce impact logging*, sedangkan di bawah itu harus dilakukan pengayaan. Potensi dari sini cukup besar. Untuk konsep degradasi

lebih banyak di perusahaan, terutama HPH, di PHPL ada indikator untuk meminimalkan dampak rusak penebangan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi sekarang belum seperti itu. Hal ini menarik ketika dilakukan asesmen: pada waktu menyusun riil C, dampak penebangan konsesi dengan status PHPL-nya baik, ternyata tebangannya lebih jelek daripada yang tidak mendapat status baik. Hal ini menjadi catatan bahwa indikator ini harus menjadi indikator wajib.

Perlu dipahami juga, di dalam NDC kita melihat kebutuhan kayu, ketergantungan pada hutan alam itu bisa berkurang apabila target HTI dan HTR terpenuhi. Ini asumsi dalam model NDC. Untuk produksi kayu dari hutan alam targetnya tuh, kalau itu susah kita harus mengejar pada lahan-lahan yang tidak produktif untuk membangun HTI-nya. Selain itu juga sumber kayu pertukangan tidak hanya dari hutan alam tapi juga perkebunan, sekarang hanya dari karet, sekarang sawit sudah masuk peremajaan, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengembangkan kayu sawit ini. Target NDC itu 30.000 hektar kayu sawit untuk pertukangan, potensinya sampai 260ribu hektar, sekitar 15% dari total yang diremajakan. Tapi ini tidak rasional kalau kata Gapki, karena masalah teknis: biaya untuk mengangkut ke pabrik. Ini harusnya bisa difasilitasi pemerintah. ...

Akselerasi pembangunan hutan tanaman, yang sudah ditanami 12 juta yang sudah dikeluarkan baru 1 juta yang tidak produktif 4 juta, yang bentuk lahan pertanian dan perkebunan 4 juta, HTI IUPHHT 7 juta itu untuk lahan pertanian yang tidak produktif, ini menjadi exercise untuk mulai mengembangkan komoditas dengan masyarakat, meskipun tidak produktif, banyak perusahaan yang tidak bisa menanam lahannya karena konfliknya yang sangat tinggi. Preferensi masyarakat harus diperhatikan.

Akselerasi HTI, pada prinsipnya mendukung terutama mereka yang hutannya masih hutan alam, maka dia wajib untuk menanam dua kali dari land clearing yang dilakukan. HTI banyak yang tidak produktif, kalau dia masih berhutan alam masih sekitar 1,7 hektar, kalau 2,8 juta harus ditanam juga, jadi mereka tidak hanya ambil kayu, nanam, mereka harus menanam hutannya yang sudah tidak lagi bedaripadarhutan. 50% dari izin usahanya, kalau 6 tahun sudah dicampur. Kalau seandainya 3 tahun harus sudah ditanami. Ini hal-hal yang diusulkan wilayah2 HTI yang banyak memiliki high risk, perlu ada mekanisme insentif yang mesti diberikan. Itu percepatan HTI di NDC ya.

Untuk pengelolaan gambut, ada dua kegiatan: restorasi gambut (rewetting, revegetation, revitalization) dan pengelolaan tata air gambut (perusahaan: HTI dan perkebunan). Targetnya 684 ribu hektar untuk NDC. Ini baselinenya zero, artinya apa? setiap perbaikan dihitung sebagai kontribusi. Dalam konteks restorasi gambut kalau komoditasnya sesuai dengan ekosistem gambut, tentu akan menjadi menarik. Tapi PR-nya ada di pasar. Inilah kondisinya: tidak produktif (apl, hph, hti) ini subjek untuk restorasi, yang sudah menjadi hutan tanaman dan perkebunan ini cocok untuk perbaikan sistem tata air, ada yang melebihi target NDC, tapi kendalanya adalah proses pelaporannya belum ada. Ternyata implementasinya, areal HTI 2,32 juta hektar, definisi yang dipakai nampaknya berbeda. Angka ini jauh lebih tinggi. Kalau dilihat laporan kinerja kementerian restorasi itu juga akhirnya bisa kawasan hidrologi, yang berupa pemulihan ekosistem hidrologi gambut.

Sebagai penutup, sangat penting untuk mengarustamakan NDC: indeks jasa ekosistem, tapi bagaimana analisis ini bisa dimanfaatkan, bagaimana aktor mengimplementasinya; insentive untuk sektor swasta, memfasilitasi adopsi sistem pertanian di ekosistem gambut, unit pengelolaan hutan di daerah yang high risk, meningkatkan produktivitas tanaman, dan meningkatkan akses dana.

Iwan Wibisono

Semoga teman-teman bisa mengikuti kecepatan Pak Rizaldi. 17 dari 209% berasal dari sektor kehutanan, saya mencatat, cukup besar intervensi tadi dari private sector, bagaimana target tadi (HTI, HPH, dll) sangat tergantung kepada private sector, saya berempati kepada mereka, margin keuntungan di kehutanan kan sangat kecil, bisa jadi membuat bisnis utamanya juga tidak baik. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Silahkan

Agus Salim

Kita sudah menstate 41% saya lihat di CM2 itu 38% itu darimana? Kok bisa ada gap. Yang kedua terkait dengan indeks biogeofisik, melihat yang ada di situ sangat warna biru dan ijo, tidak terlalu ekstrim, tapi yang kami alami di lapangan sangat berat yang di Sulteng, apalagi di Lore Lindu yang ada hubungannya dengan TORA kan overlap juga.

Hasbi B

Perhitungan deforestasi sebenarnya yang dipakai apakah deforerstasi menggunakan pemerintah indonesia atau berdasarkan kalkulasi global? Kalau misalnya deforestasi 2017 saja 470ribu kata KLHK, tapi kata FWI 1,4 juta. Salah satu perbedaannya adalah karena pmeeirntah tidak menghitung HTI. Jadi hitungan mana yang dipakai? Jika memakai hitungan pemerintah saja, sampai 2030 kita tidak akan mencapai NDC, 0,5 juta hektar per tahun bisa hilang. Pesimis lah ini. Sekitar 35% deforestasi berasal dari kawasan non hutan yang bukan dikontrol oleh KLHK, siapa yang punya tupoksi di situ? Siapa yang punya tugas mengendalikannya?

Ahfi Wahyu

Skenario yang dibuat, kalau kita lihat dari target 800 ribu hektar per tahun itu rasanya mustahil sekali, sekarang ini baru tercapai 240-300 ribu hektar per tahun. Apakah ada skenario yang diciptakan untuk melihat gap-gap seperti ini? Misalnya untuk rehabilitasi lahan dan ekonomi.

Iwan Wibisiono

Silahkan direspon Pak Rizaldi.

Rizaldi Boer

38% : dari energi gak mau nambah porsi tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang 11%, sisanya timpang ke kehutanan, 41% paling tidak segitu, yang realitstis dari situ itu sudah berat sekali. Baseline perpres itu beda, yang 1,1 juta hektar, baselinnya sudah rendah, targetnya ditingkatkan lagi. Pemahaman sektor juga berbeda-beda. Di SNC, 1,1 juta hektar per tahun, NDC itu 0,1 per tahun. 29% dari itu lebih berat lagi. Sama juga dengan LG, semakin rendah, semakin berat. Di energi, renewable dianggap tidak ada.

Sulteng high risk : kalau dilihat satu-satu itu memang high risk. Itu hanya masalah skala saja.

Definisi hutan : sesuai dengan redd - hutan alam saja, kalau sudah jadi HTI berarti deforestasi, tapi KLHK beda, yang HTI tidak masuk deforestasi, tapi negara-negara lain juga beda, dalam implementasi tergantung definisi masing-masing negara gimana, bukan sekedar hutan alam saja. Ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu kita cermati.

Gap : kita sedang usahakan, ternyata kegiatan rehabilitasi pun tidak pada wilayah high risk, bagaimana dan rehabilitasi ini penguatan kph, perhutanan sosial, ini harus diperhatikan, untuk semua orang memiliki informasi yang sama supaya gampang koordinasinya. Tapi di NDC itu 7 itu gak pernah tercapai, 5-6% saja, serasa kedepan ini penting untuk melihat pertumbuhan ekonomi, semua target sektor diupayakan tercapai, yang discarifice itu sawit saja, tapi tahun 2050, sampai 2030 masih sama dengan target pemerintah. Di sektor energi tetap bertahan dengan coal dan tidak menurunkan emisi, tapi lebih ke energi security, jadi masih bussiness as usual. Low carbon development, kalau deep decarbonization 1-2 degree mengacu pada Paris, sedangkan yang LCD yang ngambang (indikasinya tidak jelas), makanya orang-orang lebih banyak yang pengen pake isiltah LCD.

Iwan Wibisono

Satu round lagi. Silahkan.

Arinta Hapsari

Sebagai pihak dari sektor swasta, ketika dikatakan kita bisa berkontribusi pada NDC apakah lokasi juga dibatasi? Terkait wilayah penilaian kinerja, segala kegiatan NDC itu harus berada di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, baseline kita di Kalteng keprojeakan, apakah nantinya bisa dianggap NDC dari kegiatan intervensi kami?

Teguh Surya

Semakin mendengar penjelasan, semakin mengerti, tapi semakin bingung juga. Jadi dari penjelasan tadi, terkait inovasi kebijakan, ada dua permenLHK yang menurut kami kontraproduktif p10/2019 dan p62/2019 secara tertulis itu mengurangi komitmen, bahwa perlindungan hanya di puncak gambut saja, bahkan bisa tetap dibudayakan. Ini bagaimana? Apakah tidak sebaiknya kebijakan ini dilihat ulang? Bagaimana kita bisa menularkan semangat? Harusnya kan kebijakannya makin selaras. Yang kedua, tadi kan ada capaian restorasi gambut, kami yakin kita akan sulit negosiasi dunia kalau di K/L saja tidak ada kesamaan data, di RPJM Perrpes 19 capaian restorasi di konsesi itu hanya 8% dari target 3,1 juta hektar. Sementara di APL baru 77% bagaimana bisa ada perbedaan? Ini dokumen publik bahkan internasional, bagaimana kita bisa menjelaskan ada dua dokumen yang menjelaskan angka yang berbeda. Ketiga, di Papua dari tutupan lahan 2018, itu sebenarnya dari 9,6 juta hanya 300rb hektar saja yang belum dibebani izin. Menurut kami, jika ada niat baik untuk mereview kembali, bisa sangat membantu mencapai komitmen tadi. Karena jika tidak begitu Papua angkanya begitu besar. Izin sawit di Papua itu di hutan alam yang bernilai tinggi.

Jasmine

Bagaimana sinkronisasi antar *everell* yang menggunakan baseline berbeda dengan LOI? Bagaimana sinkronisasi kontribusi kepada NDC nya? Kedua, terkait dengan adanya

resubmisiion *everell* ingin tahu bagaimana posisi gambut ke depan? Di *everell* sebelumnya gambut itu belum dilihat sebagai suatu emisi yang besar. Apakah ini akan ada pada *everell* berikutnya? Terima kasih.

Iwan Wibisono

Di tengah-tengah banyak sekali alasan kita untuk pesimis. Sebagai pemikir NDC di Indonesia, apakah bapak tidak punya kekhawatiran, seperti yang disampaikan Bung Teguh: ketidaksinkronan kebijakan, dan lain-lain? Begitu juga rencana pembangunan kita kedepan kok sepertinya agak mengkhawatirkan, katakanlah *omnibus law* itu yang bisa jadi akan meng-*overshoot* semua kegiatan NDC. Inovasi yang disampaikan tadi banyak sekali, tapi apa iya kita bisa menuju ke sana dengan kecenderungan hari ini?

Rizaldi Boer

Ini tidak bisa dijawab sendiri ya. Ujung-ujungnya kita mesti melakukan pengawasan dan *law enforcement*. Memang banyak aturan kontradiksi yang keluar, tapi bagaimana peran kita? Peran kita lah di situ, jangan sampai kita patah semangat. Kita harus mencegah itu terjadi. Jadi menurut say aitu intinya tadi *law enforcement* dan pengawasan. Bagaimana *law enforcement* dan pengawasan ini bisa jalan? Balik lagi ke yang tadi: informasinya transparan atau tidak, sebagai based untuk pengawasan dan law enforcement. Saya rasa kita mengarah ke sana dalam rangka pengawasan, meskipun agak lamban. KLHK pun sebenarnya sudah sangat menekankan bahwa segala perencanaan harus berbasis spasial pada tingkat tapak, tapi sayangnya indeks kerjanya masih poin nasional, bukan indeks spasial. Misal indeks deforestasi turun karena Sumatera Barat tidak dihitung lagi karena Sumatera Barat sudah tidak berhutan. Yang kedua, perbedaan angka itu terjadi karena perbedaan definisi. Hal yang sama juga dengan restorasi. Direktorat PPI tidak bisa mengakses PPK karena datanya confidential. Restorasi itu lebih banyak di hidrologi, bukan di gambutnya. Kita percuma saja berkoar-koar berapa restorasinya kalau gak ada kegiatannya. Butuh waktu dan kesabaran untuk melakukan perubahan. Di kehutanan juga masih kontroversi komoditas perkebunan boleh masuk. Kalau kita bersuara terus mudah-mudahan bisa sejalan. Kita gak bisa menjawab sendiri, karena ini tergantung pemerintahnya sendiri.

Everell : Itu susah memang, *everell* itu negosiasi. Mekanisme RBP (*result based payment*) itu adalah mekanisme multilateral. Salah satunya GCF yang di PBB, ada lagi yang FCPF, *bio carbon fund* juga ada. Ada juga yang bilateral, Norway. Masing-masing dari skema itu juga punya keinginan masing-masing. Kita pun inginnya kan konsisten, seharusnya kan merujuk pada apa yang sudah disepakati. Tapi ternyata negara-negara ini membuat aturan mereka sendiri. *Everell* ini kan bebas tergantung negara masing-masing, kita pakai yang panjang karena bisa mengcapture proses yang ada di dalam negeri. Kota Bogor kalau ngukur iklimnya pendek, bisa rendah, kalau kita buat rata-rata untuk menggambarkan kondisi secara umum. Akan tetapi negara party ini pengennya las ten years, akhirnya kita GCF. Kita harus menyesuaikan, seharusnya berapapun penurunan emisi harusnya dibayar, ternyata tidak. Akhirnya kita revisi lagi. Jadi kita hanya 20 tahun saja. Berdasarkan decision, kita harus balik lagi ke warning (balik k nol lagi). Lalu Norway, pengennya 10 tahun terakhir, Kaltim pakai 10 tahun terakhir, yang membedakan itu hanya periode preferensinya saja. Tapi kalau kita bandingkan, *everell*-nya itu lebih tinggi. Tapi akhirnya Norway nya gak mau. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Untungnya waktunya tidak ada yang overalap. RBP untuk FCPV 2014-2017, Norway 2017 saja tapi bisa extension, RCPF 2021, jadi artinya tidak ada yang

overlap. Artinya Kaltim pun bisa mengajukan yang RBP lewat GCF. Jadi untuk resubmission nantinya posisi gambut dan kebakaran akan dimasukkan. Dulu tidak dimasukkan karena data kita belum cukup bagus. Sekarang growth soil juga dimasukkan. Jadi bukan karena kita tidak mau memasukkan, tapi karena data kita masih belum cukup baik. Forest monitoring system kita belum mampu sampai situ, hanya hutan alam saja yang mampu kita lihat. REDD kita tuh terbatas dari primary ke secondary, tapi kedepan gambut dan kebakaran akan dilihat, termasuk juga mangrove.

BPK itu hanya berlaku untuk REDD, kalau diluar wilayah kinerja REDD tidak bisa dapat RBP. Tapi aksi mitigasi bukan hanya di wilayah kerja saja. Target NDC itu tidak hanya REDD saja, karena NDC itu lebih luas.

Iwan Wibisono

Terima kasih Pak Rizaldi. Pesan utamanya adalah optimis itu harus meskipun tantangannya banyak. Tadi dikatakan juga bahwa ada potensi, kebijakan memang tidak nyambung satu sama lain dan itu sebagai masyarakat sipil harus mengadvokasi terus menerus supaya memastikan bahwa target NDC disupport dengan kebijakan kuat, yang nyambung sama yang lain. Meskipun kalau kita baca hari-hari ini, trennya gak ke sana. Itu sebuah tantangan yang ada di depan kita. Terima kasih Pak Rizaldi atas penyampaiannya yang sangat lengkap, semoga bisa memperkaya pengetahuan teman-teman semua.

Saya persilahkan ke bang Medril. Tadi ada satu pertanyaan, bagaimana koneksi antara kebijakan dengan desain NDC di Indonesia. Ada berbagai inisiatif, seperti RPJMN baru yang menarik untuk dicermati, bagaimana korelasinya dengan NDC.

LCDI DAN RPJMN SERTA UPAYA IMPLEMENTASI NDC INDONESIA SEKTOR HUTAN DAN LAHAN (Medrilzam, Bappenas)

Medrilzam

Assalamualaikum. LCDI dan NDC itu sama saja, tapi memang di LCDI itu bahan tambahan yang kita insert agar tidak hanya berpikir *silo*. Tadi disampaikan bahwa isu perubahan iklim ini masih sayup-sayup terdengar, padahal gak gitu. Perjalanannya panjang, dulu ada Perpres 61/2011 jauh sebelum itu sudah pernah ada inisiasi untuk masuk ke RPJMN. Intensitasnya memang makin tinggi dari mengeluarkan pertama dari INDC, NDC, *low carbon development* dan sebagainya. Perjalanannya cukup panjang dari 2011, saya masih ingat betul antara planning sejak Kyoto Protocol dari 2005. Dalam konvesni perubahan iklim UNFCCC sudah mengamanatkan Article 34 bahwa berbagai program yang mitigasi dan adaptasi harus dinintegrasikan pada pembangunan, tidak boleh menjadi stream pembangunan sendiri. Ini sudah terefleksikan di RPJMN. Kita tidak hanya bicara jangka menengah, ini sudah menjadi visi Indonesia di 2045 termasuk target-targetnya kedalam jangka panjang, supaya tidak kehilangan arah.

Ini yang tadi diributkan. Angka 29-41% itu kan tidak keluar dari NDC, tapi dari INDC, presiden menyampaikan ini kemudian di Paris, yang berasal dari FGD yang lebih dari 20 kali. Ini berdarah-darah, saya dimarahin dari asosiasi semen, dirjen peternakan, bisa gak emisi dari sektor peternakan. Tapi poinnya adalah untuk menghasilkan angka itu perjalanannya panjang, itu pun mengacu dari apa yang sudah dimiliki pemerintah. Tadi ditanyakan memang waktu di awal untuk pertumbuhan ekonomi di 2015-2019 memang di-set-nya 7% pertumbuhan ekonominya. Padahal di INDC itu tidak segitu set-nya, 5,6-5,7% pertumbuhannya. Itu pun tidak tercapai, kita hanya 5,0%. Saya masih ingat betul ketika mengumumkan target, saat itu kayanya Indonesia itu dikulitin: Indonesia tidak ambisius, seakan-akan tidak mau melakukan penurunan emisi global, tapi ternyata negara lain juga sama aja. Tapi sekarang malah muncul pertanyaan: mungkin gak nih 29% terlalu ambisius. Karena ini kita harus melihat kapasitas kita juga.

Pada waktu bicara INDC atau NDC ini masih paradigma biasa lah. Tadi pak Rizaldi mengatakan ada *Low Carbon Development*, semacam titik tengah dibanding *Deep Carbonization*. Tapi transisinya ini yang harus kita jaga betul. Misalnya dalam sekejap kita tidak boleh menggunakan batu bara, apakah itu mungkin? Dalam konsep LCDI ini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi. Jangan sampai karena pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi kita jeblok. Kita harus bisa mempertahankan ekonomi naik, emisi kita turun. Makanya kita perkenalkan LCDI itu dengan satu indikator baru, tidak hanya emisi, tapi juga intensitas emisi. Intensitas emisi itu apa? Sederhananya emisi per satuan output ekonomi. Kita ingin output ekonomi naik, tapi emisi kita turun. Artinya intensitas emisi kita harus turun ke depan. Jangan sampai emisi turun, tapi ternyata intensitasnya naik. Itu yang kita gak mau. Policy-nya apa? Itu yang harus dicari, agar dua-duanya berjalan beriringan.



Pada saat kita menyusun RPJMN 2020-2024 LCDI dimasukkan ke sini melalui proses KLHS, jadi tidak sekedar penurunan emisi tapi juga daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak melulu berbicara per sektor, tapi kita harus bisa melihat interkoneksi antara hutan dan pertanian,

seberapa banyak hutan yang bisa direstore untuk pertanian. Kita desain LCD dalam satu kerangka utuh dalam pemodelan sistem: mengintegrasikan antara emisi-ekonomi-lahan-energi-kemiskinan, semuanya saling terkoneksi. Kita coba address dalam format SDGs nya. Yang paling penting adalah: policy nya apa? Riil nya kan kita pasti saling connect, kita tidak bisa hanya bicara tentang hutan saja, tapi juga harus connect dengan yang lain. Satu policy di air pasti akan mempengaruhi policy di yang lain. Yang terjadi dalam kenyataan ini semua policy berjalan bersamaan. Makanya di dalam desain LCD ini agar policy-policy yang ada, setting ekonomi tidak turun dengan penurunan emisi yang naik. Pencapaian tahun 2018 22,85% padahal harusnya di 2020 itu harusnya targetnya 26%. Artinya policynya harus dimainkan.

Selama ini yang terjadi proses antara menyusun policy dengan sektor, antar sektor pun tidak ada komunikasi, kita menambahkan elemen: carrying capacity, sehingga ketika menyusun policy itu harus ada perhitungan carrying capacitynya, pertumbuhan ekonomi naik, dan emisi turun. Dan ini pasti akan ada trade off. Trade off ini yang kita jaga betul, jangan sampai mengorbankan penurunan emisi, atau pertumbuhan ekonomi yang tidak tumbuh. Ini kita jaga dengan policy.

Perjuangan panjang, walaupun dikritik kiri kanan, kita berhasil memasukan penurunan emisi GRK menjadi sasaran KEM (kerangka ekonomi makro). Artinya hitung-hitungan ekonomi harus dikaitkan dengan penurunan emisi. Hitung-hitungan ini sudah ada dan sudah disepakati di sidang kabinet. Semua sudah set, karena ini sudah diputuskan di sidang kabinet. Pembangunan Rendah Karbon (LCD) berada di prioritas nasional. Tahun 2011 isu perubahan iklim itu ada di pengarus-utamaan. Ini sudah top, karena menjadi pegangan di semua pihak, harus everywhere, tapi ternyata no where. Oleh karena itu sekarang didorong masuk di prioritas, dengan begitu pasti ada mata anggarannya. Ada lima sektor termasuk mangrove. Lima ini akan menjadi hitung-hitungan kita (limbah, pembangunan ekonomi berkelanjutan, energi, industri hijau, dan rendah karbon pesisir dan laut).

Target yang ada di RPJMN itu rada ambisius, karena tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah, makanya kita mengundang private sektor, temen-temen CSO, ini yang leverage-nya yang kita taro. Misalnya efisiensi energi ini. Yang ditulis di sini adalah yang punya dampak langsung terhadap penurunan emisi. Banyak dari apa yang ada di kita, tidak bisa dihitung dampaknya. Misalnya patroli, KPH, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang tidak bisa dihitung penurunannya. Contoh misalnya TORA dalam land konsolidasi itu kan banyak, tapi tidak bisa dihitung. Kalau mau dibandingkan antara inventory dengan mitigasi itu kan gap nya sangat besar. Inventory kan gampang aja ngitungnya. Dalam inventory itu kan ada kegiatan-kegiatan mitigasi yang tidak bisa dihitung. Ini harus bisa dilihat pencapaiannya tiap tahun. Misalnya tahun 2020 saja, benar tuh tercapai 300.000 untuk gambut? Kalau ternyata hanya 100, pemantauan tiap tahun itu menjadi kunci. Kami sekarang sedang mengembangkan sistem aksara, dulu PEP namanya, ini akan menghasilkan potensi penurunan emisi yang akan di-linkan dengan SRN dan seismarc, yang akhirnya kita bisa keluar hanya dengan satu angka. Pengendalian ini akhirnya yang menjadi penting.

Tentang Blue Carbon. Tahun 2020 target KKP hanya 200 hektar, KLHK hanya 1000 hektar, padahal targetnya 10.000 hektar per tahun. Tapi tahun pertamanya aja segitu. Jadi kalau gak didukung private sector sama lsm akan berat. Karena berat untuk merestorasi mangrove buat

mereka. Yang tadi tercatat itu di RKKL. Masih ada minus, kurang 3800 yang harus diselesaikan, ini harus didorong dari berbagai pihak.

Hasil exercise, tentang model penurunan emisi. Patokan kita di 29% di 2030, di 2024 dari hasil policy keluar angka 27% yang sudah link dari berbagai target di ekonomi. Angka ini menjadi referensi selama 5 tahun kedepan. Saya tahu persis di lapangan juga banyak kendalanya. Dan itu tidak hanya di sektor kehutanan, sektor energi juga sama. Tapi ya harus tetap semangat. Sektor itu punya kekuatan sendiri-sendiri. Mempengaruhi mereka tidak mudah. Untuk mereka mau harus ada approach yang cukup kuat. Yang penting sekali lagi, kita harus melihat keseimbangan, harus ada saling mengisi. Mungkin itu dulu.

Iwan Wibisono

Menarik, termasuk proses kelahiran LCDI, RPJMN, bahwa tidak ada persoalan antara Bappenas dan KLHK, dan semua prosesnya sudah terkoordinasikan dengan baik. Poin penting bahwa isu perubahan iklim itu tidak hanya mainstreaming tapi sudah menjadi prioritas. Itu yang menurut saya penting dan harus jadi catatan bersama. Silahkan pertanyaan.

Yosi Amelia

Dalam RPJMN terdapat beberapa major project dan di situ juga ada prioritas nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perubahan iklim dan ketahanan iklim. Nah bagaimana strategi implementasi agar major project ini sejalan dan tidak kontradiktif untuk mencapai PN 6 ini¹.

Jasmine

Mengenai IKN, belum masuk kedalam hitungan ini, karena melihat IKN pasti akan ada deforestasi. Dan bagaimana dengan trade off nya, melihat deforestation ratenya akan tinggi. Kedua, bagaimana Bappenas melihat kementerian lain, dalam hal LCDI, Papua dan Papua Barat ada nasional priority program untuk menjadi megapolitan ini juga pasti ada trade off, melihat carrying capacity trans papua seperti lorenz natofagusnya sudah mulai ada mati; bagaimana ini skema dalam penurunan emisi?

Ahfi Wahyu

Melihat angka-angka tadi, saya agak gemetar. Kalau kita lihat ada keluar angka 27 dalam konteks komitmen perubahan iklim dan harus bisa selaras dengan TPT, pertumbuhan ekonomi 5,4%, sepertinya tidak akan tercapai, pengangguran di Indonesia mencapai 6 juta sekian, ketika kita lihat laporan bisnis kemarin pertumbuhan ekonomi 1% itu hanya bisa menyerap Angkatan kerja 400.000. Kalau lihat angka ini menjadi: bagaimana tekanan yang akan terjadi pada sektor kehutanan? Mungkin Pak Medril bisa cerita lebih jelasn, bagaimana ini kedepannya? Apalagi ditambah dengan pasar modal di Indonesia yang sedang hancur lebur.

Pamela

Dalam pembangunan Indonesia harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi. Padahal kalau baca dari LCDI adalah, menariknya kalau kita memilih *low carbon development*, ekonominya justru akan lebih tinggi daripada BAU. Saya mau bertanya,

¹ Prioritas perencanaan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 tentang 'Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.'

dalam hal LCD, sebenarnya Indonesia bisa memilih untuk mengembangkan industri yang *low carbon*, misalnya electric vehicle industry. Sudah ada perpresnya, namun sayangnya belum ada roadmap yang jelas. Bappenas sendiri bagaimana berperan membangun industri yang low carbon seperti ini? Kedua, mengenai peran Bappenas dalam pengawasan terhadap development plan yang ada di Indonesia. Misalnya di sektor energi kita punya ruen, core export itu 400 juta ton, padahal riil-nya ternyata 610 juta ton. Pertanyaan saya adalah, menanggapi hal-hal yang seperti ini, jadi planningnya sudah baik, tapi dalam implementasi tidak terjadi. Bagaimana peran Bappenas menjadi focal point itu memastikan planning yang sudah dibuat, dijalankan dengan baik.

Agus Salim

Terkait dengan komitmen dari lembaga donor kepada pemerintah Indonesia, kebetulan kami juga terlibat dengan project yang skemanya on budget – on treasure yang masuknya ke CM2 (modelling NDC). Sekarang kan penurunan emisinya di set di 27%, jadi memang dari awal pembangunan yang sekarang itu tidak akan sampai penurunan emisi yang 40%, jadi kira-kira penjelasan ke lembaga donor, kira-kira gimana? Saya tertarik sebetulnya di level macro-nya seperti apa.

Hasbi B

Kami mengapresiasi sekali masuknya lingkungan hidup, kehutanan, dan perubahan iklim ke dalam RPJMN sebagai prioritas nasional dengan target yang cukup ambisius. Saya memang belum lihat final version dari RPJMN. Namun, dari draft yang saya baca, sebagai masukan, ada 2 itu yang kami lihat, isu kesenjangan dan pemerataan menjadi perhatian, tapi pada target yang kami lihat itu pemerataan dijawab dengan kota metropolitan. Target yang kedua, yaitu program reforma agraria, seharusnya targetnya adalah jumlah lahan distribusi lahan tapi yang dicatat adalah jumlah sertifikat yang dibagikan.

Medrilzam

Major Project : dalam RPJMN ada istilah baru '*major project*' - proses memfilter mana yang paling super top priority yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan anggaran (dan indikator lainnya) yang tersedia. Terkait dengan bidang lingkungan, saya belum berani memasukan deforestasi, tapi yang akan menjadi major project pada bidang lingkungan adalah B3 Medis (B3 Terpadu). Limbah B3 ini sangat parah apalagi B3 Medis. Perubahan iklim masih bisa nunggu lah. Di Indonesia itu tidak ada pengolahan B3 Medis, buangnya pada ke TPA, kalau gak ke sungai, banyak juga yang dipakai lagi. Termasuk juga B3 terpadu, hanya ada di Cileungsi. Itu major project yang harus kita dorong. Termasuk juga early warning system. Kita berharap major project ini tidak tabrakan satu sama lain. Di RPJMN, LCD ini kita sisipkan kedalam bab 3, terkait dengan wilayah (prioritas nasional 2) kita diminta untuk menyampaikan daerah-daerah mana yang *do* dan yang *donts*. Itu kita sudah petakan semua, dan kita beritahu ke teman-teman di pembangunan wilayah. Jadi penanggung jawab yang lain di bagian infrastruktur, dikasih tau supaya ngikutin *do* dan *donts* tadi. Mereka harus mencari alternatif teknologi. Dalam menyusun RPJMN kita sudah berkoordinasi dan kami menyuplai data ke mereka wilayah *do* dan *donts* yang memang ukurannya makro per provinsinya, detailnya dilakukan oleh kementerian/lembaga masing-masing. Tapi memang harus difahami, dinamika pembangunan ini perubahannya begitu cepat. Virus saja tidak ada di RPJMN. Makanya mekanisme kita selalu mengevaluasi target-target pembangunan setiap tahunnya, termasuk pemantauan di PP 39 setiap 3 bulanan, di PP 17/2017 untuk melakukan pemantauan di

sleuruh K/L. yang dipantau itu adalah kegiatan yang pembiayaannya oleh APBN, yang tidak ada kaitannya langsung misalnya DMO. Ini yang seringkali miss. Saya akui ini PR. Ini tidak mulus. Yang sifatnya implementable, policy gitu banyak yang gak sesuai dengan apa yang kita tetapkan.

IKN : temen-temen mesti tahu persis kondisi di sana seperti apa. Tutupan lahan di sana itu kurang dari 10% dari 260.000 hektar, jika mengacu petanya LHK. Ini momentum besar untuk merestorasi kembali wilayah di sana. Karena presiden juga inginnya bikin Forest City. Menurut hemat saya, seharusnya sudah tidak ada lagi pertanyaan itu. Yang sekarang kondisinya gak karuan itu, mau dihijaukan kembali. Setahu saya teman-teman LHK sudah menyiapkan bibit, persemaian dan lain-lain untuk di sana.

Papua : banyak sekali pihak yang melihat bahwa Papua menarik secara ekonomi. Kami di Bappenas sangat concern terhadap pembangunan di Papua, termasuk LCD. Kenapa kami ingin masuk ke Papua? Karena kami tidak mau Papua kaya pulau-pulau lain. Kami setuju kalau mereka harus konservasi, tapi orang Papua juga harus maju. Persoalan kita dari dulu, setiap ada akses, bubar jalan itu hutan, Kalimantan juga sama (PLG). Cuma ya mau gak mau, kita harus memberikan akses kepada masyarakat. Ini yang paling penting adalah pengendaliannya. Kita sedang menyusun logframe, supaya safeguardnya kuat, supaya tidak sembarangan bikin investasi di sana. Termasuk pengendaliannya. Saya harus garis bawahi, kita memang perencanaan bagus, tapi masalahnya di implementasi dan pengendalian yang amburadul. Di sinilah harusnya good governance berjalan.

Angka-angka : memang ini ambisius semua, tapi ya karena semangatnya harus optimis, karena presiden mintanya angkanya harus selalu tinggi. Ini sengaja diset angka tinggi supaya semua berinovasi, meski tidak tahu akan tercapai atau tidak. Apalagi kondisinya sekarang sedang tidak kondusif. Pertumbuhan ekonomi kita didorong melalui manufaktur, ini sudah pasti penurunan emisinya akan tidak tercapai. Karena emisinya pasti akan naik.

Kredit CM2 : tergantung temen-temen negosiasinya seperti apa, kalau kreditnya sudah diserahkan kepada kita, silahkan masuk ke yang 41%. Kalau yang hibah itu menjadi bagian yang 41.

Pemerataan : banyak kegiatan yang sudah diupayakan terkait pemerataan, mengenai target memang debatable dan panjang, dan sangat politis. Kalau hanya sekedar sertifikat hanya berapa hektar apalagi penguasaan belum tentu. Saya kira yaa apa yang bisa kita lakukan ya lakukan dulu. Kedepan mungkin perlu disinkronisasi terkait target-target. Kalau dari sisi program sudah banyak. Tapi persoalannya efektif atau tidak. Yang cukup mendominasi penurunan emisi. Angka 12,7 juta hektar, kemampuan Cuma beratus ribu hektar per tahun, alhamdulillah sekarang sudah 3jutaan selama 5 tahun. Memang gak tercapai, tapi ya lumayan ini progressnya, sampai ada dirjen khusus. Hal seperti itu yang sebetulnya yang kita ingin dorong: gapapa gak tercapai, yang penting ada movementnya.

Industri hijau : memang ada keinginan pemerintah untuk mendorong manufaktur terutama di daerah yang Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu instrumen untuk mengejar itu ada di perindustrian dan energi. Ini sudah kita bahas cukup intens, bahwa kawasan industri dibangun dan dia harus sustainable development. Tidak mudah memang, harus diakui.

Karena industri yang masuk masih brown industry. Memang pengendaliannya harus kuat melalui safeguard yang cukup kuat, melalui industri hijau yang juga ada programnya di kementerian perindustrian. Tapi pada intinya temen-temen di perindustrian sudah cukup aware. Masalah efisiensi energy, limbah, bukan hanya menjadi referensi, tapi juga harus sudah dilakukan. Misalnya tentang kualitas air kita yang semakin lama semakin buruk. Setelah kita dalami, mantau airnya saja, sungai besar itu paling 2-3 kali per tahun. Bagaimana kita bisa mengendalikan pencemaran yang ada, kalau sample yang diambil cuma 2-3 kali per tahun? Ini di RPJMN kedepan, ini masuk menjadi major project, kita pasang online monitoring system per 10 km di badan air sungai-sungai. Jadi kalau ada fluktuasi bisa langsung ditangani oleh command centre. Setiap industri harus pasang online system di outlet. Harapannya kedepan gak kejadian lagi ngambil sampel 2x setahun. Ini menjadi bagian dari pengendalian. Sekarang online tiap jam dipantau. Ini untuk perindustrian yang akan dikembangkan di sini, melalui teknologi masalah air. Belum masalah emisi memang. Kemarin kami sudah me-set dengan kementerian perindustrian dan KLHK untuk menghitung kontribusi dari masing-masing sektor untuk LCD. Biasanya yang paling besar semen, pulp and paper, dan fertilizer. Tapi intinya industri ini sudah well address ya.

Ahfi Wahyu

Kepala daerah kan lagi demam *bond* untuk pembangunan ekonomi daerah, bisa gak kita kedepan melihat kriteria lebih spesifik untuk kredit hijau perbankan memasukan tata ruang daerah sebagai indikator yang harus jadi prioritas pembiayaan mereka. Termasuk juga indeks-indeks yang lebih clear, misalkan di OJK atau pasar modal, bagaimana pemerintah daerah bisa menganggarkan tata ruang yang hijau, yang ternyata saat ini belum jadi prioritas perbankan nasional.

Medrilzam

Memang ini step by step ya, me-link-an antara sektor industri, perbankan, apalagi kaitannya dengan green, tidak bisa sekejap. Karena pemahaman sektor perbankan saja masih.. aduuh.. Tapi alhamdulillah temen-temen OJK sudah mensyaratkan, sudah listing di bursa, semua harus ada sustainability report yang akan menjadi pegangan. Harapannya sustainability report ini yang menjadi pegangan operasional kedepan. Tinggal riilnya seperti apa, bagaimana insentifnya. Tinggal tools-nya gimana. Karena kalau yang kita dorong penegakan hukumnya nanti investasi tersendat. Keseimbangan ini yang harus dilihat. Jadi masalah tadi tentang *sustainability report* sudah menjadi diskusi yang cukup lumayan lah.

Iwan Wibisono

Terima kasih bang Medril. Sengaja saya tadi tidak memotong diskusi teman-teman, karena kita punya waktu yang cukup untuk berdiskusi. Kita memang agak mulur, tapi intentionally supaya kita lebih punya banyak waktu untuk berinteraksi dan mendalami lebih jauh. Saya pikir pemahaman kita lebih baik. Pemerintah sudah membuka opsi yang cukup banyak baik dari RPJMN maupun NDC, yang harus dikawal dan disupport adalah implementasinya seperti apa. Saya pikir interaksi ini menarik. Setelah makan siang nanti akan ada Eka, kita akan coba lihat implikasi lainnya. Kami berharap teman-teman masih stay untuk mendiskusikan kita sebagai masyarakat sipil mau ngapain sih.

Medrilzam

Sori, saya tambah sedikit, terkait ruang partisipasi, Bappenas sedang mengembangkan, tidak hanya pemantau pengendalian tidak hanya K/L tetapi juga masyarakat sipil dan juga *private sector*, biar kita keluar dengan satu angka. Supaya yang diusahakan mereka ter-record. Contoh yang mangrove tadi. Kalau temen-temen bisa membantu

Iwan Wibisono

Selain menambah pencapaian, pencatatan tadi juga memantu untuk tidak overlap. Setelah makan siang kita kembali ke ruangan ini.

Luluk Uliyah

Terima kasih, kita kasih applause. Kita ketemu lagi jam 14.00. Nanti ada mbak eka dan beberapa kawan yang lain.

SESI II

Iwan Wibisono

Setelah tadi pagi kita mendengarkan pemaparan dari Pak Rizaldi dan Pak Medril, saya kira kita sudah punya pemahaman yang cukup utuh terhadap apa yang disebut sebagai NDC Indonesia. Khususnya untuk sektor kehutanan, karena itu akan menjadi fokus diskusi kita. Kita berusaha selesai jam 4, diskusi setelah makan siang ini, untuk mencoba membahas apa yang akan kita lakukan sebagai kumpulan organisasi, setelah data dan informasi yang telah kita dapatkan. Karena pertimbangannya adalah bahwa tahun 2020 adalah tahun yang cukup penting. Paris Agreement itu starting poinnya tahun ini. Temen-temen bisa menyampaikan update programnya apa aja. Bisa gak kita coba bangunin lagi *climate justice forum*? Sebuah tempat ketemu bareng meskipun nanti Bergeraknya sendiri-sendiri. Pengalaman kemarin ketika kita mau ngasih input ke NDC, kalau engga nanti kita terlewat. Hal itu bisa dilakukan kalau kita punya kapasitas yang memadai. Oke, tanpa perlu berlama-lama, saya persilahkan mba Eka, ini veteran, yang tadinya REDD, kemudian NDC, DNPI, sayang ini kalau tidak dimanfaatkan. Silahkan.

Eka Melisa

Terima kasih teman-teman. Kalau bicara data memang mereka yang perlu kita lihat. Tapi saya di sini mau mengajak temen-temen semua untuk melihat lebih luas. NDC adalah bagian dokumen komitmen perubahan iklim. Tapi NDC itu bukan merupakan tujuan akhir, serupa RPJMN, ini midterm. NDC Indonesia kelihatannya baru melihat sampai 2020. Setelah 2020 kita belum ada. Seolah-olah seperti Indonesia tidak ada lagi.

Kemarin ketika berbicara NDC Update, gimana sih komitmen jangka panjangnya di Indonesia, target numeriknya. Lalu ada tingkat komitmen sektoral. Ini siapa yang buat juga kita belum tahu. Lalu ada adaptasi, NDC yang lama tidak ada adaptasi, yang baru ada. Dalam banyak hal adaptasi selalu menjadi bagian mitigasi. Lalu ada agenda baru: carbon pricing, blue carbon, dan mangrove. Dari pemerintah: Nawacita, New Nawacita, LCDI. LCDI ini menurunkan atau modelling dari strategi mengendalikan perubahan iklim, belum sampai kebijakan; agenda 2045, omnibus law, BPD LH, dan ada NSA. NDC Indonesia ada ketakutan di pemerintahan target ambisius tentang siapa yang akan bertanggungjawab.

Apakah memang ambisius? NDC kita berbasis BAU. BAU kita tidak termutakhirkan, masih pakai 2010. Harusnya dari kebakaran kemarin baseline kita seharusnya naik. Di UNFFFC, NDC itu dipaksa ada update NDC, karena rata-rata hanya melihat sampai 2020.

Paris Agreement merubah cara pikir, tidak ada dikotomi negara berkembang negara maju, semua sama. Mencari formula yang tepat agar semua negara dapat berkontribusi itu belum selesai memang. Yang kedua ada dua target: bedanya 29 sama 41 apa sih sebetulnya? Sebagai CSO kita bisa mulai melihat dengan memberikan kriteria: yang masuk 29% itu apa, apakah hutang itu boleh masuk 29%, atau bukan begitu, ada isu itu yang masih perlu diperjelas.

Iwan Wibisono

Termasuk phasing out tadi, di saat yang bersamaan kita banyak terima bantuan, apakah kita bisa double track? Paralel ada yang masuk.

Eka Melisa

Indonesia secara pemerintahnya belum sepakat mana database yang digunakan. Ada SRN (sistem registrasi nasional), adan aksara. Kita punya double perhitungan, ini yang menyebabkan untuk kemudian menyebut 29 atau 41. Selama mereka tidak bisa agree maka sulit buat kita untuk mengukur. Itu memang PR berat. Ini langkah kita bersama. Kemudian pemutakhiran NDC tidak ada target baru, hanya aksinya saja diperjelas. Keempat, penyusunan target sektoral NDC selalu menjadi perdebatan antar sektor - yang perlu kita pertanyakan kalau mau mengatakan ini NDC, proses mana yang harus dimulai, dulu NDC awal itu top down dan bottom up secara bersamaan. 26% dibagi rata, bottom up nya masing-masing kementerian mengajukan. Tapi kemudian ketika 29, tidak bekerja sebagaimana sebelumnya. Kelima, dikaitkan dengan PRK: kalau baca NDC ada pergeseran -- bahwa ini harus menunjang investasi, private sector harus selalu diikutsertakan, tapi negatifnya adalah: membiarkan investasi hijau tetap berjalan -- di NDC sudah mulai ada.

Aksi mitigasi di sektor lahan. Saya khawatir perdebatan kita dengan pemerintah hanya dengan angka tidak akan menemukan titik temu, karena misalnya cara perhitungannya yang berbeda. Pemulihan lahan berkelanjutan lebih banyak berbicara tentang resotarasi gambut, hutan dan lahan, jadi ada perbedaan terminologi dan perbedaaan grouping, bahkan dari teman-teman yang melakukan planning penurunan emisi. Terkait elemen implementasi NDC, hal yang perlu diperhatikan: ketersediaan sumberdaya dan kapasitas yang memadai. Kebanyakan tidak, hanya list of activities; belum kelihatan akan menjawab yang mana. Lalu penganggarannya pun belum jelas. BPD LH baru terbentuk, padahal kita tahu kalau yang baru kebetuk itu tahun-tahun pertama masih sibuk dengan DIPA-nya; ketersediaan data dan perangkat; NDC itu sangat sektoral, ketika melihat sektor lahan itu hanya berbicara deforestasi, tapi menegaskan penggunaan lahan, untuk sawit, dan lain-lain. Padahal di sektor energi ini kelihatan; target di sub national: yang targetnya lain lagi; peran non state actors: karena takut terlalu besar angkanya. Di NDC itu kan sectoral target sekali, apakah kita tidak mau melihat jurisdictional juga?

Target NDC yang harus diperhatikan: IKN - ini isu baru, tapi akan sangat mempengaruhi kita di NDC. Ada beberapa target yang saya lihat menjadi implementasi, bisa menjadi opportunity atau bisa juga menjadi alasan untuk mengelak. Ini semua dicoba dimasukan kedalam NDC. NDC bukanlah end product, kita harus masih membangun longterm strategic planning terkait perubahan iklim yang Indonesia belum punya. Karena Indonesia belum punya scenario peaking yang decline untuk emisi gas rumah kaca. Ada target penurunan emisi 41% dari BAU 2030. Pertama, kita tidak tahu BAU-nya yang mana. Kalau kita pake BAU yang 2010 berarti itu sangat-sangat tidak ambisius. Lalu ketika kita berbicara tadi 41% udah turun, kita tidak mengatakan bahwa setelah kita turun, kemudian emisi gas rumah kaca itu harus turun baselinenya. Statement itu gak ada. Seharusnya kalau kita punya long term strategy, ada waktunya kita *peak* dan kemudian kita harus *decline*. Jadi jangan terlalu khawatir NDC yang gak mau naik, tapi kamu make sure baseline-nya harus betul.

Membangun Strategi Jangka Panjang



- Membangun Skenario 'Peaking and Declining' untuk emisi gas rumah kaca
- Menetapkan Baseline paska 2020 (apakah sama?)
- Membangun skenario terkait strategi ketahanan iklim termasuk penurunan emisi jangka panjang (Long-Term Strategy)
- Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan perlindungan lingkungan
- Memastikan kontribusi *non-state actors* terefleksikan dalam, stratgei.
- Memastikan strategi komitmen perubahan iklim terefleksikan pada RPJP 2025-2045 dan Agenda 2045

Kemudian menetapkan baseline pada 2020 apakah akan sama dengan 2010? Kemudian menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ini yang jelas memastikan kontribusi non state actor, untuk bukan hanya menjadi objek, tetapi juga pelaku. Kemudian yang selalu kita terlupa adalah bahwa kita terlalu fokus di RPJMN, tapi lupa untuk melihat di RPJP. Jadi ini perlu dilihat.

Ini saya mau nunjukin perbandingan antara EU dengan posisinya Indonesia. EU long term climate strategy dengan apa yang kita punya. Mereka masuk kedalam semua detil, kemudian mereka lihat dari 2030 ke 2050 seperti apa. Mereka juga masuk ke detil beberapa sektor tapi kemudian non state actors menjadi bagian dari strategi dan rencana mereka. Jadi gak ada lagi by APBN atau non APBN. Ini harapan juga bagi Indonesia supaya bisa muncul seperti ini.

Isu pada COP 25 dan COP 26 kita bicara Article 6 tentang pendanaan perubahan iklim (kerja sama internasional untuk perubahan iklim), termasuk carbon pricing, bukan satu-satunya, ada loss and damage, ada isu CDM, dan transparansi. Kalau di Glasglow NDC Emissionnya rendah sekali, bisa menjatuhkan semangat semua negara. Ini yang diharapkan di Glasglow ada net zero team, dimana mau merekanya itu adalah net zero emission secara total. Maunya Inggris. Setidaknya Inggris yang harus membuktikan bahwa mereka sudah net zero. Kemudian new collective finance school, transparency framework, flexibility harmonization, dan reality check dari Paris Ambition Cycle. Pertanyaannya adalah, kalau sudah seperti ini, Indonesia mau apa? CSO Indonesia mau apa?

Iwan Wibisono

Makasih Eka. Kita kasih tepuk tangan. Saya mau nambahin juga dari yang dipresentasiin Pak Rizaldi, satu kekhawatiran saya, apakah memang mitigasi utamanya itu menjawab persoalan di sumber emisinya? Bahwa sumber emisinya ada kebakaran lahan, tapi yang kita lakukan adalah menanam? Performa Indonesia terendah, di 2017 paling rendah, karena tingkat kebakarannya rendah, tapi 2019 naik lagi. Kalau Indonesia mengerjakan PR di gambut, selesai

sebetulnya. Rehabilitasi dengan target tumbuh 90%, itu gak ada. Padahal biasanya juga mentok di 20%. Realistis gak sih sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Rizaldi itu di PHPL? Apakah intervensi utama kita tepat atau engga? Perhutanan sosial itu dijadikan sumber utama penurunan emisi, padahal dia sebenarnya bukan sumber emisi. Jadi sumber utamanya ini tidak di-address.

Poin yang bagus dari Eka adalah apakah kita cuma hanya hidup 2030 kah? Jangan-jangan angka ini hanya menjadi angka. Optimis harus, tapi jangan pesimisme itu tumbuh. Kasih pandangan terhadap apa yang disampaikan tadi, kira-kira apa sih yang menjadi kegelisahan temen-temen, sebelum kita berbicara lebih strategis.

Ahfi Wahyu

Kita semua belum pernah lihat modelnya seperti apa, ini agak susah menganalisis secara kritis atas dokumen tersebut. Ketika kebijakan NDC itu disusun ada keterlibatan peran non-state actors (CSO), ada kekhawatiran soal kepastian soal anggaran dan manajerial, karena naturenya itu selalu bebannya di APBN dan swasta. Juga ketidakpastian bagaimana dari scenario *offset* itu sendiri. Saya lihat ada nuansa psikologis di sana dalam menyusun NDC. Berikutnya, dalam dokumen NDC, ekonomi makro selalu dilihat dalam kerangka yang dangkal. Tahun 2015 kebakaran hutan bisa terjadi, karena pertama, harga komoditas anjlok, dan yang kedua performa kredit usaha macet, dan ekonomi agak stagnan waktu itu. Sehingga itu berpengaruh pada ekonomi makro Indonesia, dan itu tidak pernah dilihat konteks secara mendalam bagaimana melihat asumsi dari *everell* maupun *baseline* yang dibangun. Baseline itu selalu dibuat 'oke pertumbuhan ekonomi sekian' tapi tidak pernah melihat detail di level apa yang terjadi di tahun-tahun itu.

Iwan Wibisono

Kalau boleh di-*summarize*, Ahfi mau bilang jangan-jangan kebakaran hutan yang rendah itu bukan karena intervensi tapi karena kondisi makro yang terjadi.

Ahfi Wayu

Ya saya harus akui itu. Saya semakin meyakini kondisi ekonomi makro itu pada level detail itu kita bisa gunakan sebagai narasi untuk melihat performance NDC kita. Kondisi 2015, 2016 kita lihat angka net performing itu tertinggi, dan itu yang menyebabkan industri banyak yang agak berhenti dan slow down. Jangan-jangan NDC tercapai itu karena kondisi ekonomi makro, bukan karena hasil intervensi dari kebijakan atau kegiatan yang disusun. Karena kalau kita lihat tadi hampir mustahil nanam keberhasilan sampai 90% itu dimana.

Iwan Wibisono

Tapi kalau kita lihat proporsi budget terbesar di KLHK itu penanaman.

Ahfi Wahyu

Data yang tadi disampaikan itu buat saya tidak masuk akal. Satu koma tujuh trilyun untuk rehabilitasi dengan keberhasilan tahun ini hanya 60.000, bisa bayangkan kalau kita gak amati hal-hal detil gitu kita akan kehilangan konteks dan kebijakan kita akan normatif gitu-gitu aja.

Eka Melisa

Saya setuju dengan Ahfi. Memang menarik soal NDC ini. Waktu NDC dibuat konteksnya hanya melihat komitmen perubahan iklim. Pada saat itu 2005 dan 2010 komitmen perubahan iklim hanya dilihat sebagai bagian dari lingkungan. Itu yang kita dorong, bahwa perubahan iklim bukan isu lingkungan tok, harus lihat ekonomi dan sosialnya. NDC yang ini (yang baru) dicoba dibangun, tapi agak tersendat, karena pada dasarnya ini tidak pernah digunakan, terus mau nambah elemen baru. Nah ini agak sulit, karena terlalu cepat. Ini yang menurut saya memang perlu ditulis juga, bahwa memang ada perbedaan kondisi. Mungkin itu sih. Tapi konteks bahwa iklim itu sekarang sudah berubah menjadi isu pembangunan itu kan baru 5 tahun terakhir.

Ahfi Wahyu

Terakhir, soal policy kita harus lihat detail. Kebetulan waktu itu saya terlibat di sektor sampah. Kalau kita lihat undang-undang sampah itu mandeg. Sekarang NDC menargetkan perubahan *open dumping* ke *sanitarian filling*, siapa sih yang sanggup ngerjain itu? Anggarannya pun gak sanggup. Belum lagi pada level yang remeh temeh, misalkan: NSPK sampai sekarang untuk sampah pun belum ada. Hal-hal yang mendasar seperti itu sepertinya CSO harus berperan, membangun narasi untuk memperbaiki kebijakan itu.

Iwan Wibisono

Satu kata kunci dari Ahfi menurut saya adalah *look into the detail*. Karena kalau melihat angka-angka besarnya aja sepertinya semuanya menjanjikan. Tetapi pada saat kita udah detail, baru ketahuan 'masuk akal gak sih angka-angka itu, realistis gak sih'. Gak ada yang salah apa yang disampaikan Pak Rizaldi itu. Tapi kalau kita lakukan *reality check*, nah itu yang perlu dicek. Sebetulnya yang kita diskusikan bukan untuk melemahkan semangat kawan-kawan pemerintah, tetapi lebih kepada mengkritisi 'bener gak sih kamu menempatkan target di situ'. Jangan-jangan targetmu tidak menjawab persoalan sumber emisinya. Tetapi jadi kaya *offset* aja, bahwa yang mengemisinya tetap *business as usual* yang lain ditekan untuk berkontribusi untuk pengurangan emisi.

Ardiyanto

Jangan-jangan sebagai CSO kita terlalu nyaman, kita selalu dilibatkan, tapi kenyataannya lagi-lagi kita tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Selanjutnya adalah aksi adaptasi. Selama ini ribut kebakaran hutan, tidak pernah sekali dibilang berapa satwa yang hilang. Aksi adaptasi di pengkinian NDC sudah dibahas tapi ketinggalan. Kami bisa berkontribusi di tingkat tapak, tapi tidak pernah ada jalannya. Harapan kami tentu adaptasi ini tidak ketinggalan, bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat.

Iwan Wibisono

Kita itu sangat getol membahas mitigasi, tapi adaptasi tidak pernah. Bahwa berfikir terpisah itu ada di kita. Kita selalu lupa dalam menyampaikan proses adaptasinya gimana. Saya pun berfikirnya begitu, adaptasi belum pernah terpikirkan. Kayanya capacity building diantara kita itu penting banget.

Eka Melisa

Apakah kita sendiri terjebak sebetulnya: penggrouping kegiatan perubahan iklim, deforestasi ada mitigasinya, ada adaptasinya, ada juga financing, jadi dikotomi di kepala kita juga harus dihilangkan.

Yuyun Indradi

Hal yang belum sempat, kita itu juga terjebak sektoral, kita lebih banyak ngomongin hutan. Contohnya di Kalimantan Timur: izin yang diterbitkan 13 juta, sementara luas daratan Kalimantan Timur 12 juta. Itu campuran dari 5 juta dari izin tambang, 5 juta HTI, 2 juta kebun, dan sebagainya. Itu juga satu masalah yang pada waktu itu mau diselesaikan dengan one map. Itu masih terjadi dan itu terjadi di tempat lain di Indonesia. Jadi kalau ngomong lahan itu juga tidak terlepas dari sektor energi. Dimana hulunya sangat erat bersinggungan dengan isu-isu lahan. Dan itu juga yang gak banyak dibahas di sini. Paling tidak dari sisi deforestasi dia peringkat ketiga.

Iwan Wibisono

Sebetulnya interkoneksi antara satu isu dengan lainnya itu nyambung. Bahwa buat temen-temen yang bergerak di energi, misalnya bio-energi itu *renewable energy* dengan dampak emisi yang lebih rendah. Tapi sebetulnya di sektor lahandampak emisinya bisa jadi lebih tinggi.

Cynthia

Kalau saya concern melihat komitmen energi pemerintah. Pemerintah meningkatkan target biofuel menjadi B50 atau B100, apa nanti dampaknya, trade off nya emisi dari sektor lahan. Bagaimana kita sebagai CSO bisa *pulling into the risk* yang harus kita pertimbangkan.

Luluk Uliyah

Berbicara adaptasi dan mitigasi ini seperti balik lagi ke COP 13 tahun 2007. Sekarang itu tidak ada koalisi yang bicara bareng-bareng. Kalau dulu kan ada CSF, climate justice. Ini cukup menarik ketika ada masukan NDC. Kemarin kita kelabakan, ada satu yang tahu, kemudian yang lain kelabakan tidak tahu. Saya lihat masukan itu sangat sedikit sekali. Karena kawan-kawan dari sektor lain banyak yang tidak tahu. Kawan-kawan dari masyarakat adat tidak tahu, anak-anak pesisir tidak tahu. Padahal tahun 2016 kalau tidak salah, pada saat NDC Indonesia itu baru dimasukan ada email yang dikirim kepada seluruh kawan-kawan yang kerja di sektor yang berkaitan dengan perubahan iklim dipersilahkan mengirim masukan. Makanya kemarin ketika Anggi cukup gelagapan, kita cukup kaget 'besok loh dikumpulin'. Sepertinya memang harus ada forum lagi yang memang berbicara tentang perubahan iklim Indonesia. Walaupun dulu perdebatannya (kanan, kiri, tengah) cukup alot. Tapi itu cukup memberikan suara masyarakat sipil untuk perubahan iklim. Itu cukup kuat untuk dorongan. Makanya nanti perlu ada pengumpulan lagi. Juga ngumpul kawan-kawan muda yang tertarik untuk perubahan iklim.

Iwan Wibisono

Yang disampaikan mba Luluk pas banget ya. Ini sudah jam 3 kita saatnya untuk mendiskusikan ini. Setelah sekian lama, kita baru ngobrol lagi kemarin di Kemitraan. Saat ini semua orang yang ngobrolin ini pada waktu itu masih ada, tapi sedang pada fokus yang berbeda-beda. Kemampuan dan knowledge kita ada di situ. Tapi kita mengalami kebingungan harus mengambil posisi seperti apa. Contoh, Madani fokusnya di lahan dan hutan, ya udah fokusnya

di situ. Adaptasi agak gak kepegang. Akhirnya semuanya jadi sendiri-sendiri. Tadi mba Luluk bilang ada platform di 2007, *climate justice forum*. Meski beda mazhab, tapi ini normal, ada perdebatan, ada berantemnya. Sekarang jangan-jangan kita sendiri-sendiri, berantemnya gak ada.

Teguh Surya

Yang kita lupa dari semua koreksi, kita kehilangan objektif, lu mau ngapain sih? Ini kan kita kayak reaktif juga. Aku pikir sih kita sah-sah saja kalau punya minat sendiri. Kalau ada organisasi yang minatnya di isu mitgasi ya silahkan, gak apa-apa. Jalanin aja. Tapi yang lain ini jangan ikutan. Lu harus punya minat lu sendiri. Sehingga walaupun ada satu badan, lembaga, seperti CSF dulu ya, itu hanya mengorkestrasi. Hari ini kan engga. Kemana angin bertiup, nah di situ persoalannya. Energi sudah semakin menipis, pengetahuan gak nambah-nambah. Objective setting yang harus dibangun.

Iwan Wibisono

Setuju. Jadi mungkin kalau main bola, kita jangan seperti tim Indonesia lah ya. Kaya ikan gurami, di situ ada bola, di situ kita berlari.

Jasmine

Perlu mengaddress transparansi - bahwa ada masalah governance dan transparansi. Setelah saya double check, ternyata tidak ada deadline yang mengatakan yang harus submit waktunya kapan (NDC yang baru). Terlepas dari masalah teknis ngomongin angka dan lain-lain, menurut kami isu governance dan transparency itu harus di push. Selain itu, greenpeace juga melihat biofuel itu menjadi satu itu yang besar, karena kita melihatnya dari climate and energy, ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita sudah melakukan studi, potensi berapa land conversion yang bisa dilakukan sampai 2025 dengan demand sampai B50. Ini perlu ada diskusi di kita bagaimana tempelannya dengan NDC. Karena di kita pun terpecah, ada yang mau biofuel, masih cukup green, kalau di greenpeace kami menolak karena pada akhirnya itu tidak green afterall. Selain itu juga, menurut saya kita butuh ada diskusi dengan para negosiator, karena bisa jadi atas nama pemerintah Indonesia punya kepentingan yang segregate dengan kita para CSO. Ruang ini perlu dibuka. Saya ingat waktu itu mba Yaya dari Walhi sempat mau mengagendakan pertemuan antara negosiator dengan kita untuk melihat gap nya seperti apa. Selain itu yang perlu kita lihat adalah adanya ketidaksinkronan antara nasional dan sub nasional, kita lihat adanya gagap target yang berbeda dan juga kegagalan dalam implementasi. Perlu ada asistensi teknis dari CSO untuk pemerintah daerah. Terkait dengan everell, kami melihat penting untuk mendapatkan draf everell nya seperti apa, untuk dikritisi kembali, karena tadi Pak Medril bilang bahwa gambut dan kebakaran akan masuk kedalam elemen utama. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diagendakan diantara temen-temen CSO. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa bersama melihat omnibus law, akan terjadi pelemahan-pelemahan dalam menindak kebakaran hutan. Terkait dengan everell, kami di greenpeace ketika ada kebakaran hutan, kami menghitung emisi dari burn scar dengan equation yang persis sama di everell itu tidak bisa diterima. Tapi sampai detik ini emisi dari kebakaran hutan sendiri tidak pernah di-publish oleh KLHK. Bagaimana ada acceptance antara CSO dengan pemerintah ketika membicarakan data mereka dengan equation mereka, itu bisa diterima sebagai bentuk kritik. Itu aja sih.

Iwan Wibisono

Tadi ada beberapa poin. Tadi ada yang menarik terkait nasional dan subnasional bahwa ada beberapa inisiatif bagus yang mungkin bisa menjadi cikal bakal bagaimana subnasional berkontribusi. Terutama yang sekarang getol dikerjain itu Papua dan Papua Barat. Nanti setelah ini kita akan coba identifikasi poin-poin apa saja yang bisa dibawa pulang ke organisasi masing-masing. Dulu kita punya DNPI yang kita bisa dapatkan berbagai macam draf penting. Sekarang kemewahan itu tidak ada. Artinya kita harus berjuang lebih keras lagi.

Ogy

Saya setuju dengan mbak Jasmine, bahwa sinkronisasi data harus ada data tandingan kalau mau mengkritik. Saya juga setuju dengan mas Iwan di depan bahwa kadang mungkin yang kita cegah itu bukan sumbernya, seperti tadi bahwa KPH lah yang dituntut untuk melakukan penurunan emisi. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga yang bisa kita advokat ke pemerintah juga sangat sedikit, KPH dan KEE. Baru dua itu yang punya payung hukum yang jelas untuk melindungi wilayah-wilayah yang terancam degradasi atau yang mempunyai carbon stok tinggi. Sampai saat ini yang bisa kita lakukan hanya sebatas itu.

Aziz

Di NDC, biofuel sebetulnya overlapping di tiga sektor: lahan-kehutanan, energi, dan limbah. Emisi yang terbesar kan dari limbah, 50% dari situ. Kalau saya lihat lagi NDC 2015-2019, seakan-akan kaya autopilot aja gitu, bakal ada B30. Sepertinya itu prediksi semua orang. Menurut saya itu bukan aksi mitigasi. Misalnya kalau mau memang mau naikin biofuel, gunakan used cooking oil (minyak jelantah). Hal kaya gitu yang harusnya muncul di NDC berikutnya.

Ricky

Kemarin Traction juga baru selesai penelitian tentang NDC biofuel yang hasilnya untung-untungan. Biofuel ini emang agak susah sih kalau mau dijadiin kebijakan energi. Karena drivernya bukan itu. Karena awal mula biofuel itu triggernya dari kebijakan ekonomi untuk menyerap oversupply CPO. Gara-gara dianggap memiliki potensi bagus secara ekonomi makanya lonjakan angka baurannya terus meningkat. Tahun depan aja kita sudah masuk ke B40. Kami dengan LPM melakukan perhitungan tentang supply dan demand biodiesel di Indonesia, dengan pertumbuhan segitu cepatnya akan ada kemungkinan defisit CPO. Setelah itu kemungkinannya adalah kita akan buka lahan atau impor CPO. Sama terjadi di jaman dulu, dulu eksport minyak sekarang jadi import minyak. Dan memang kalau dilihat dari land bankingnya perusahaan masih punya sekitar 4 juta hektar. Ada kemungkinan juga untuk memenuhi target baurannya Indonesia memakai biodiesel. Ini udah masuk ke major project juga. Jadi pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia sangat erat dengan land use change.

Iwan Wibisono

Menarik ya, point penting tadi bahwa biofuel itu bukan karena ingin menghasilkan energi bersih tapi karena motivasi ekonomi.

Eka Melisa

Ini argumentasi yang menarik mengapa Indonesia harus ada peak and decline. Karena kalau kamu gak cerita any peaking, ya kenyataannya kaya gitu. Kita masih boleh membuka hutan, kita masih boleh mengeluarkan emisi atas nama ekonomi. Jadi argumentasi ini yang perlu

dibangun. Narasi kenapa harus ada strategi itu belum disusun (peak and decline). Jangan sampai setelah NDC selesai kita masih buka lahan. Kita mau berantem dengan pemerintah, mereka akan mengerjakan itu sendiri kok. Levelling up our fight groundnya, kalau biofuelnya dibuka, boleh ada tapi tidak membuka lahan.

Iwan Wibisono

Peaking dan decline itu akan berguna. Jadi jangan BAU yang dipakai. Peaking menjadi salah satu poin untuk didorong terus.

Ricky

Sebetulnya kalau kita mau pake cara pemerintah, yang peduli dengan ekonomi, sebetulnya kita bisa pakai used cooking oil (minyak jelantah), ini bisa memenuhi kebutuhan 15% dari bioethanol. Lewat used cooking oil juga kita bisa nyasar isu kesehatan, yaitu stunting yang tidak boleh lagi pakai minyak jelantah. Kita juga bisa tabrakin dengan kebijakan pemerintah lain, dengan electric vehicle misalnya.

Jasmine

Kita juga mencoba melihat dan mensimulasikan uang dari pendapatan negara. Mereka selalu berargumen kenapa butuh biofuel. Ternyata dari hitungan kita menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada cost saving anggaran negara dari penggunaan biofuel. Jadi sebenarnya argument ekonomi yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah adalah tidak ada saving uang dari penggunaan pengurangan fosil fuel. Tapi ini juga mesti dilihat secara hati-hati karena bisa jadi digunakan untuk penguatan argument 'oh yaudah kita pake fossil fuel aja'. Tapi penting juga kita membuat narasi seperti di Eropa bahwa biofuel itu adalah periode transisi untuk menuju renewable energy. Yang perlu dipersiapkan pada sektor energi adalah roadmap untuk renewable energy.

Iwan Wibisono

Kalau tadi saya bayangkan, terkait bahan bakar minyak jelantah, nanti barangkali bisa pesan minyak jelantah aroma KFC, atau aroma ayam geprek.

Sigid Ariyanto

Pertemuan ini sangat menarik saya perhatikan dari awal tadi. Kita selalu berpikir split-split tergantung organisasi kita, juga tergantung donor. Di tingkat kementerian pun kadang harus ada koordinasi karena terlihat berbeda-beda. LSM pun begitu. Kalau kita mau jujur, kita juga tergantung donor. Tetapi kita terlalu berfikir pada level itu, karena sebenarnya donor ketika masuk kepada suatu negara sudah mendukung agenda negara itu. Makanya ditariknya selalu ke NDC atau SDGs Kita tidak hanya bicara pada level itu. Kadang-kadang pemerintahan memang kecampuran politik luar negerinya, di dalam negeri belum siap, tapi mau gak mau mereka harus ngikutin. Dalam hal climate change, semua civil society ini gerakannya harusnya massif, walaupun tersplit, nanti kan muaranya sama. Apapun kegiatan yang mendukung ke arah itu, ketika gerakannya massif, dalam artian lobi-lobi pemerintah, karena pemerintah tidak akan rela ekonominya anjlok demi penurunan emisi. Pak Medril udah menyampaikan seperti itu. Artinya setiap lembaga negara yang paling penting adalah GDP. Itu jadi utama. Walaupun korbannya lingkungan. Jadi yang saya sampaikan adalah, kita juga harus memperhatikan apa yang penting menurut pemerintah, sehingga kita bisa menjadi lobi-lobi yang sejalan antara perekonomian yang meningkat dan penurunan emisi juga bisa terjadi.

Novri Auliyansyah

Pas ngomongin ekonomi, setelah dihitung-hitung tidak saving. Begitu juga omnibus law, investasi di Indonesia hanya menyumbang sedikit, dan penyerapan tenaga kerja juga belum tentu. Tapi selalu ngomongnya ekonomi. Malah kalau kami lihat, HTI dan perkebunan sawit juga orang-orangnya sama saja. Di pemerintahnya ada oligarki. Mereka ketakutan sama penyandang dananya itu, gak cuma lembaga keuangan tapi juga OJK-nya juga. Mungkin itu bisa menjadi lubang untuk melakukan litigasi.

Iwan Wibisono

Terkait isu keuangan, menarik ya untuk follow the money untuk bicara mitigasi dan sebagainya. Termasuk juga sumber emisi.

Al Ayubi

Kita perlu melihat dari segi politik, persoalan politik ini luput padahal dampaknya riil. Kekhawatiran saya yang lain, terkait data. Secara teorinya ambisi tadi akan berhasil adalah tergantung political will, bicara seberapa banyak tenaganya di pemerintah. Kemudian tadi juga Pak Medril bilang bahwa pemerintah butuh bantuan. Tapi saya belum nemu bentuk konkrit membantu itu seperti apa. Tapi mungkin itu bisa diawali dengan data. Terakhir, tentang dinamika yang terjadi bagaimana media dan partai politik hari ini. Ketika kita membicarakan hal ini, di satu sisi ada omnibus law yang sedang berjalan itu gimana.

Iwan Wibisono

Kalau boleh saya cukupkan belanja isunya segitu dulu.

Eka Melisa

Boleh klarifikasi dulu sebentar? Saya agak worry dengan baseline itu dinamis. Tapi dinamis tidak dalam arti tiap tahun selalu berubah. Karena once itu dinamis, itu gak ada bedanya dengan tidak menghentikan emisi.

Iwan Wibisono

Temen-temen punya masing-masing sektor ya fokusnya. Saya mau call untuk 2 hal. Dulu kita punya climate justice forum yang menjadi forum bersama organisasinya beda-beda, skillnya beda-beda, tapi paling engga, pada saat yang dibutuhkan misalnya membuat input bersama. Tapi paling engga ada satu platform bareng untuk berbagai informasi, update, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira kita goalnya apa? Terlepas dari situasi tadi, sebetulnya di antara kita ada kebutuhan untuk gerak bareng, mobilisasi, untuk misalnya kalau ada konsultasi publik dengan pemerintah, kita bisa gerak. Kira-kira menurut temen-temen apa sih yang perlu kita lakukan. Gak perlu dibahas detailnya, dengan poin apa aja. Nanti dilaporin ke lembaga masing-masing. Kira-kira RTL nya mau kaya apa sih?

Nadia Hadad

Ini bukan tiba-tiba karena ini sudah berkali-kali kegelisahan yang seperti ini muncul. Tapi memang naturenya sudah berbeda tidak seperti jaman CJF. Dimana pada saat itu kita masih baru membuat komitmen tersebut. Kita semua dalam posisi yang sama. Jadi suaranya itu masih sama. Sementara dalam perjalanannya sekarang sudah melalui proses, ada yang menurut sektoral, isu dan lain-lain. Itu mungkin yang membuat suara yang sekarang tidak

seperti dulu yang massif. Tapi kembali lagi, kita melihat ini adalah sebuah urgency. Kaya tadi pagi saya bilang kita bereaksi corona outbreak aja mass hysteria, tapi ini yang di depan mata aja kaya gak ada yang sadar. Ini juga mengancam loh, banyak yang bakalan mati. Tapi terus kok tenang-tenang aja semuanya. Mungkin memang udah saatnya bareng-bareng lagi. Gak harus satu inisiatif, bisa macem-macem, tapi kita bisa mendorong pemerintah untuk lebih sadar. Jadi alangkah baiknya kita bisa sama-sama memikirkan inisiatif yang bisa kita kerjasamakan, atau paling tidak disinergikan. Kalau Madani kita mulainya dengan progress report NDC yang dibantu oleh Iwan. Acara ini juga untuk menyempurnakan dokumen tersebut yang nanti akan dibagikan ke teman-teman, terutama untuk di sektor lahan. Mungkin ada temen-temen yang lain yang membuat laporan sejenis yang bisa memperkaya. Kita bisa masuk di COP lain, atau di aksi-aksi yang lain.

Eka Melisa

Kita bisa mulai dengan strategi atau sesuatu yang lebih pragmatis. Kita ini sekarang perlu memvisualisasikan tuntutan kita. Bisa aja kita membangun itu bersama-sama. Sebagai CSO, tuntutan pertanyaan kita terhadap pemerintah apa sih? Kemudian divisualisasikan. Menyusun argumentasi bersama, untuk isu apa, untuk disampaikan ke pemerintah, tidak harus negatif, terkait dengan komitmen pemerintah di Glasgow. Sama Yaya kita pernah ngobrol untuk strategi komunikasi bersama, katanya sih Walhi mau nge-lead. Kita menunggu diskusi itu.

Iwan Wibisono

Sebetulnya memang gak perlu strategis yang canggih, yang penting dikeluarin dulu aja, mau teknis, pragmatis, dan lain-lain. Bisa gak kita bikin semacam climate camp gitu untuk melihat sebenarnya isunya itu apa aja sih.

Jasmine

Dua fokus utama kami: actor mapping, political economy push, untuk menekan secara kebijakan kedepan, perbaikan dari NDC dan juga implementasinya; public campaign strategy supaya lebih memfamiliarise climate crisis dengan pendekatan kebencanaan; biofuel: faktor emisi dan kebakaran hutan -- bagaimana menggunakan 3 pilar- campaign biofuel false solution, kebakaran lahan itu yang utama, transisi ke renewable energy. Terakhir, greenpeace sangat berharap, bagaimana bisa menyambungkan ke temen-temen negosiator. Karena kita juga jaringan internasional cross check dengan tim kami yang ada di amerika, dll karena mereka punya landscape politiknya.

Agus Salim

Terkait dengan data, di dokumen NDC yang dipublish di website KLHK ada 41%, kemudian kita cari sumbernya darimana, ternyata CM2 nya 38 aja. Kalau kita rujuk lagi, ada gak publikasinya, dan sebagainya. Karena buat kami menjadi mengetahui background mengapa angka tersebut bisa keluar. Jadi tahu lebih detail. Jadi ketika menganalisis memberikan ke client itu lebih jelas dan lebih enak. Yang kedua, kalau kita merujuk pada dokumen NDC yang Amerika atau China punya, itu kan cukup simple, tapi rujukannya jelas. Harapannya NDC kita ini juga seperti itu. Lebih enak buat kita, bisa jauh lebih faham.

Iwan Wibisono

Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa yang lain, kita perlu melakukan aktivitas bersama terkait data. Selain soal sinkronisasi tetapi juga soal berbagai data. Kita kan suka kritik

pemerintah karena kita tidak membagi data. Tapi jangan-jangan kita di LSM juga berbagi data itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Kemudian, selain itu adalah bagaimana kita memahami angka.

Ahfi Wahyu

Saya usulin perlu ada sesi diskusi bagaimana kita melihat dashboardnya di belakang layar itu. Jadi kita bisa minta mereka buka datanya, yang ada di Pak Boer dan Bu Gelang. Nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng.

Iwan Wibisono

Kalau dilakukan individual organisasi mereka juga capek ya ngelayaninnya. Tapi kalau kita mengatasnamakan apa CJF dua atau apalah namanya.

Teguh Surya

Terkait data, penting kekhususan kerja dan fokus dari masing-masing lembaga, expertise itu harus dibangun. Perlu kerelaan. Mulai dari Madani: kami ingin meneguhkan pemerintah untuk mencapai target NDC secara progresif, masalah mitigasi tata guna lahan (hutan dan perubahan iklim), agar tadi semua narasi semua diskursus tentang NDC harapannya bisa mengakses. Yang kedua, kenapa ini dipilih karena bagi Madani, sebelum ambisi ditingkatkan, tentu langkah-langkahnya harus diperjelas. Kalau berdebat terus, nanti gak kerja. Makanya pada waktu beberapa minggu yang lalu, kami bantuin mereka. Lebih kepada itu sih. Yang ketiga, kami ada beberapa produk: kita kan ada pengelolaan pengetahuan, setiap satu bulan ada Madani Update terkait iklim, yang berikutnya tentang political situation, dinamika politik lingkungan, tinggal kasih tau ke mbak Luluk, tinggal subscribe. Komitmen riil nya menyinggung adaptasi, kami coba mulai saja, dengan KLHK kita mendorong satu projek perhutanan sosial dengan NDC dengan proklamasi. Banyak donor perhutanan sosial, tapi hanya mengikuti genderang pemerintah. Sayang kalau hanya memenuhi target izin. Makanya Madani main di PS, tapi bukan menerbitkan 5 PS, kalau kita dapat wilayah kelola berdasarkan PS, ini bisa diukur. Terakhir, kami sadar, bahwa lahan ini, emisi dari energi akan menyalip lahan dan hutan, ini harus mulai terhubung, salah satu benang merahnya adalah biodiesel. Biodiesel ini sebenarnya bisa dihentikan, jadi solusi palsu ini harus kita buktikan dengan membangun argumen dengan: energi baru terbarukan. Ini harus ada keterhubungan antara sektor lahan dan hutan dengan energi. Biodiesel ini kepentingan korporasi yang menunggangi kepentingan pemerintah. Kira-kira begitu mas Iwan.

Iwan Wibisono

Mau gak sih kita bergerak bareng-bareng, pertemuan ini paling engga melihat kebutuhan untuk bergerak bareng. Kira-kira gimana pandangannya mendorong upaya bareng-bareng.

Ardiyanto

Tentu econusa juga commit, kami melakukan pendampingan PPRKD di 4 kabupaten di Papua disamping itu juga melakukan akselerasi di tingkat provinsi. Kami juga akan mencatat pengurangan emisi yang akan dilaporkan ke Akssara dan SRN. Saya secara pribadi, kepengen Econusa punya school of eco yang nantinya akan menjadi kampung iklim.

Sigid Ariyanto

Ada satu hal yang penting yang terabaikan: advokasi kebijakan. Karena mau gak mau disadari atau tidak antara ngo dan asosiasi perusahaan saling berkompetisi dalam membuat kebijakan, dan ngo selalu ketinggalan.

Nurjannah

Salah satu isu Pattiro adalah transparansi dan akuntabilitas publik. Kemarin kami sempat mengundang WRI, Econusa hadir dalam diskusi terbatas mengenai PPRK dalam RPJMN. Kami rencananya akan membuka diskusi publik. Kami juga mendukung pembuatan komunitas climate change.

Iwan Wibisono

Temen-temen punya intend yang sama untuk bergerak bareng.

Ahfi Wahyu

Kalau begitu, biar gampang bagaimana nanti setelah ini selesai ada matriks yang harus diisi, untuk kemudian kami serahkan ke bos.

Iwan Wibisono

Kalau saya membaca dari diskusi kita sebenarnya temen-temen juga merasakan kebutuhan bareng. Di samping itu karena ketika mempunyai isu spesifiknya masing-masing jadi harus berjejaring. Bersama itu juga menjadi lebih mudah buat advokasi. Pengalaman saya ketika advokasi pemerintah 'kemarin kan udah dateng kok dateng lagi' itu juga jadi soal ya. Saya pikir kalau kita bergerak menjadi suatu koalisi mungkin itu lebih baik ya.

Anjelita

Kami perhatiannya sama dengan yang didiskusikan, baik di level nasional, maupun di level daerah, kalau untuk berjejaring, kami sangat senang diajak, karena memang kami masih banyak yang harus dipelajari, dari pendekatan dan dari cara kita mendorong, untuk beradvokasi tidak banyak ke sana. Kami banyak support di kegiatan, kami akan aktif terlibat, kalau misalnya ada advokasi yang sifatnya lebih langsung akan kami pertimbangkan.

Iwan Wibisono

Keuntungan forum yang loose kita tetap bisa jalan sendiri-sendiri, yang penting kalau sudah ada kebutuhan kita bisa saling berbagi informasi, gak kerasa ngerjainnya sendirian. Gak harus sama posisinya untuk semua isu. Karena gak mungkin juga disamain antara posisi greenpeace dengan posisi TNC. Jadi kita loose aja. Yang penting kita masih bisa ngumpul.

Eka Melisa

Kemitraan sebetulnya tertarik untuk mencoba modul: isu-isu apa yang harus diperkaya, dan ini digulirkan. Kita tertarik untuk membuat silabusnya, kita bisa saling sharing, siapa yang punya ekspertise apa, kemitraan bisa memfasilitasi menyusun modulnya, melihat dan memetakannya.

Haykal

Ini kan jangka pendek, kalau misalnya mau dimapping jangka panjang, bisa, tapi ini butuh masukan dari berbagai pihak.

Utami (Mamik)

Hari ini kita gak ada di perubahan iklim. Tahun 2011 kita ngerjain climate change, kami punya tools, tapi sepertinya agak ketinggalan, dan agak generic: mengukur resiko korupsi yang dihadapi dalam perubahan iklim, lebih ke multistakeholder forum, tapi harus melibatkan private sector, dan lain-lain. Saat ini kita lagi konsentrasi di isu pertambangan dan bisnis principal terkait listrik (energi), soal me-encourage pengusaha untuk lebih terbuka dalam laporan mereka; ada tiga bagian salah satunya dalam transparansi keuangan, benefit ownership. Kalau untuk yang pertambangan, kita soal izin tambang, sebelum ada omnibus, kementerian esdm mulai soal lelang, karena kemarin dihentikan, pasca CnC kan ada lelang, kita memperhatikan peraturan lelang tambah di pusat dan daerah. Yang daerah baru dibuka di Kalteng, ini belum berhasil karena belum ada yang menang. Karena sistemnya belum sempurna. Dimana tuh kaitannya, silahkan dipikirkan ya.

Iwan Wibisono

Iya, jadi bisa jadi apa yang dikerjakan temen-temen ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh TII. Tapi senang TII bisa terlibat.

Fathur Rozidin

Pusaka saat ini sedang bekerja pada isu hutan dan tanah di Papua, tidak spesifik tentang perubahan iklim. Di Papua 1,3 juta hektar sudah terbit izin sawit. Bahwa menempatkan kesejahteraan Orang Papua pada relasi industri yang timpang. Pada faktanya ketimpangan itu sangat terasa, kemiskinannya berlangsung lama, ketika berbicara perubahan iklim itu seperti bisnis semu, bisnis konservasi, tanpa terasa kita turut menyematkan perubahan iklim itu di level kampung, tapi fakta masyarakat yang lebih dulu bertahan, itu tidak pernah direkognisi pemerintah. Kita ngomong soal perubahan iklim, tapi utamanya tidak terselesaikan. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan.

Iwan Wibisono

Itu pertanyaan untuk kita semua sebagai refleksi, seolah-olah definisi kesejahteraan itu temen-temen Jakarta yang menentukan. Mood dari ruangan ini adalah kita bisa bergerak sebagai jejaring, untuk menawarkan sebagai hub, yang lain juga tidak ada keberatan terhadap proses yang kita lakukan. Yang riil-nya mau bikin modul, semakin banyak perubahan iklim yang tidak hanya level jargon, tapi juga masalah teknis. Yang di ruangan ini saja banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan saya juga punya banyak poin apa yang kita buat. Terima kasih kepada teman-teman Madani. Oke, saya serahkan kepada mba Luluk. Tepuk tangan untuk kita semua.

Luluk Uliyah

Sebelum menutup semua, kita ada kenang-kenangan untuk Eka. Terima kasih kawan-kawan. Semoga tidak hari ini saja, kita mengudapte, ada agenda dari econusa, greenpeace dan yang lainnya. Nanti Madani akan kirim matriks, kawan-kawan akan mengisi. Mengakhiri acara ini kami dari Madani mengucapkan terima kasih.

-o0o-



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
